

NEWSLETTER

# PKSPARLEMEN

KREATIF, ATR

Juni | Tahun 2022 No. 35

FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA



*Habib Aboe Bakar Alhabsyi*

*Ajak Komponen  
Bangsa Berkolaborasi*

**Hadirkan**  
**Layanan**  
**Terbaik untuk**  
**Indonesia**



# Putus Mata Rantai Polarisasi, Bangun Rantai Pasok Kolaborasi

Mari ciptakan dunia politik dan sosial yang lebih kontributif dan solutif. Ada terlalu banyak ruang inspirasi di sekitar kita yang bisa diambil sari hikmahnya. Tidak perlu dari hal yang besar dan filosofis, cukup dari anak negeri sendiri.

**K**ita akan menghadapi era baru pasca pandemi, kebiasaan lama yang baik dapat menjadi salah satu modal utama dalam membangun bangsa dan negara. Kolektivitas, kolaborasi dan empati yang terus tumbuh kala menghadapi pageblug.

Tantangan baru dengan bekal sejumlah luka di belakang hari akan menjadi pelajaran berharga agar kita terus mawas diri bahwa proses perbaikan dan belajar terus-menerus menjadi prasyarat penting dalam menggapai kemajuan.

Hari-hari kelam polarisasi dan segregasi kita hadapi beberapa tahun terakhir, antarsesama kita menaruh curiga dari sesuatu yang tidak

pernah terjadi.

Sejumlah pihak berhasil memanans-manasi bahwa perbedaan yang kita miliki adalah cela yang harus dipertahankan. Mereka tidak pernah jelas biografinya, asal usul cara berpikirnya dan kontribusi kesejarahannya. Berbekal terampil memainkan teks dan narasi, mereka hinggap dalam ruang kehidupan kita. Percayalah, pendengung lebih berbahaya dibandingkan pageblug. Sudah saatnya memutus mata rantai relasi buruk dari pihak ketiga yang tidak pernah ada di ruang nyata, mereka bayang-bayang semu di ruang maya.

Perbedaan disematkan pada pilihan, orang, sikap dan

institusi, bukan pada nilai dan etika keadaban. Hingga pada akhirnya demokrasi dikooptasi oleh para oligarki dan kekuatan relasi. Cukup. Kita harus hadirkan proses politik yang melibatkan banyak orang dengan alternatif kepemimpinan yang semarak, agar tidak terjadi keterbatasan pilihan, yang terus akan menjebak kita dalam sirkulasi polarisasi dan segregasi. Atas dasar itu, PKS melakukan *judicial review* (JR) terkait ambang batas calon presiden ke Mahkamah Konstitusi.

Mari ciptakan dunia politik dan sosial yang lebih kontributif dan solutif. Ada terlalu banyak ruang inspirasi di sekitar kita yang bisa diambil sari

hikmahnya. Tidak perlu dari hal yang besar dan filosofis, cukup dari anak negeri sendiri.

## Tengok,

Kita bisa belajar dari tim basket Indonesia kala meraih emas pertama kali dalam sejarah keikutsertaan SEA Games Vietnam 2021 di Thanh Tri Indoor Stadium, Hanoi, Minggu (22/5/2022). Andakara Prastawa dan rekan-rekan memastikan emas sesuai menaklukkan juara bertahan sejak 1991, Filipina, 85-81. Mereka berhasil memutus mata rantai kekalahan, perjuangan menghasilkan kemenangan.

## Lihat,

Kita juga bisa belajar dari Liga

Inggris 2021/2022 yang memunculkan dua pemain sebagai top scorer di akhir musim. Mohamed Salah dan Son Heung-min jadi pemenang. Satu dari Benua Afrika, lainnya dari Benua Asia. Mereka berhasil memutus dominasi kedigdayaan para pemain dari Benua Eropa dan Amerika Latin. Menjadi pemenang jauh dari tempat mereka dilahirkan.

Dari pandemi kita dapat belajar tentang banyak hal. Ikhtiar bersama kita akhirnya berhasil memutus mata rantai penyebaran. Maka sudah saatnya setiap kita berlomba-lomba menjadi rantai pasok kolaborator. Kita bisa, pasti bisa, yakin bisa.



# Hari Kebangkitan Nasional, Fraksi PKS : Pandemi Reda, **Momentum** Bangkitkan Ekonomi Rakyat

## KUTIPAN

Jakarta (20/05) --- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI menegaskan hari kebangkitan nasional 20 Mei 2022 ini harus menjadi momentum bangkitnya ekonomi rakyat. Terlebih lagi, 2 tahun lebih bangsa Indonesia dihantam pandemi covid 19.

"Hari ini kita masih tetap menjaga kewaspadaan covid 19, tapi kita bersyukur pandemi semakin terkendali, masyarakat sudah lebih leluasa beraktivitas kembali. Maka momentum hari kebangkitan nasional tahun ini harus menjadi momentum kebangkitan ekonomi rakyat," kata Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini.

Jazuli Juwaini menyatakan pemerintah harus terus melakukan konsolidasi kebijakan sektor ekonomi rakyat yang terpuik karena covid 19 terutama rakyat kecil, buruh, dan pelaku UMKM. Mereka yang harus jadi prioritas kebijakan dan APBN untuk

memulihkan ekonomi nasional.

"Pesan kebangkitan nasional harus dimaknai bangkitkan ekonomi rakyat yang terpuik karena pandemi. Kebijakan pemerintah harus fokus ke sana dan Fraksi PKS siap mengawal dan berkolaborasi untuk kebangkitan ekonomi rakyat paska pandemi," tegas Jazuli.

Hal tersebut, lanjut Anggota Komisi I DPR ini, sejalan dengan pesan kunci perjuangan PKS yaitu "transformasi dan kolaborasi". Transformasi seluruh kebijakan negara untuk kepentingan rakyat dan kemajuan bangsa. Dan hal itu membutuhkan

kolaborasi seluruh elemen bangsa.

"Pandemi mengajarkan kita betapa pentingnya kolaborasi untuk menghadirkan solidaritas sosial nasional. Kini saatnya kita terus jaga kolaborasi untuk kepentingan fundamental bangsa yaitu bangkitnya ekonomi rakyat," tandas Jazuli.

Karena itu, pesan Jazuli, akhiri semua pikiran, sikap, dan tindakan yang kontraproduktif dengan semangat kebangkitan nasional. Hentikan sikap agresif, hoax, ujaran kebencian, rasial, adu domba, buzzer yang memecah belah persatuan dan harmoni. Mari saling menguatkan, saling memotivasi, saling mendukung, bersinergi dan berkolaborasi diantara sesama anak bangsa.

"Mari fokus bangkitkan ekonomi rakyat, bangkitkan martabat dan kedaulatan bangsa, bangkitkan kemandirian nasional sehingga bangsa kita makin kuat, maju, dan sejahtera," pungkas Jazuli.



**Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA**  
Ketua Fraksi PKS DPR RI

"Pandemi mengajarkan kita betapa pentingnya kolaborasi untuk menghadirkan solidaritas sosial nasional. Kini saatnya kita terus jaga kolaborasi untuk kepentingan fundamental bangsa yaitu bangkitnya ekonomi rakyat

# Propaganda LGBT Kian Masif, Politisi PKS Dorong Pengesahan RUU KUHP

## KUTIPAN

Jakarta (22/05) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Bukhori Yusuf memprotes pengibaran bendera pelangi LGBT di Kedutaan Besar Inggris di Jakarta.

Bukhori meminta pemerintah tidak membiarkan setiap perwakilan asing di Indonesia melecehkan norma dan nilai yang berlaku di Indonesia.

"Kami mendukung upaya pemerintah menegakan kedaulatan kita dengan mengirim pesan yang tegas bahwa setiap perwakilan asing di Indonesia tidak diperkenankan secara provokatif mengampanyakan nilai dan norma yang tidak sesuai dengan pandangan hidup warga lokal. Mereka harus berhenti mempromosikan LGBT dan menyunjung itikad baik untuk menghormati nilai dan norma yang berlaku di tengah masyarakat Indonesia," jelasnya di Jakarta, (22/05).

Anggota Komisi VIII DPR ini mengatakan, konstitusi telah menegaskan Indonesia sebagai negara yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa

(Pasal 29 Ayat 1 UUD 1945), sehingga agama telah menjadi ruh dan sumber nilai dari pandangan hidup masyarakat Indonesia dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Paham LGBT dapat diterima di Barat karena cara pandang negaranya yang liberal dan sekuler. Namun jangan lecehkan negara ini dengan memaksakan paham itu kepada masyarakat kita. Selain bertentangan dengan konstitusi, hal itu tidak sejalan dengan kaidah moral dan agama masyarakat Indonesia yang religius," katanya.

Anggota Komisi Agama DPR ini menambahkan, selain menyimpang dari ajaran agama, LGBT adalah penyakit sosial yang mengancam kohesi sosial di tengah masyarakat, khususnya bagi ketahanan keluarga. Oleh sebab itu, mayoritas

masyarakat Indonesia dinilai tidak dapat menerima perilaku penyimpangan seksual tersebut.

"Penolakan mereka dapat dipahami, karena selain mengusik nilai kesucilaan masyarakat, perilaku penyimpangan seksual juga membawa ancaman serius dari sisi kesehatan berupa risiko penularan infeksi menular seperti HIV/AIDS," tandasnya.

Data Ditjen P2P Kemenkes pada tahun 2019 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kasus HIV/AIDS yang mengalami puncaknya pada tahun 2019. Sementara, data UNAIDS pada tahun yang sama menyebut penyebab risiko penularan tertinggi HIV/AIDS berasal dari hubungan seks homoseksual.

Sementara itu, legislator Dapil Jawa Tengah 1 ini mengaku prihatin lantaran belakangan ini publik sering dibuat resah oleh berbagai propaganda LGBT yang dilakukan secara provokatif, baik yang dikampanyekan oleh figur publik, dan yang terbaru oleh perwakilan asing di Indonesia.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



**KH. BUKHORI, Lc., M.A.**  
Anggota Badan Legislasi DPR RI

"Pemerintah dan DPR sebenarnya memiliki opsi lain yang masih terbuka untuk mengisi kekosongan hukum soal LGBT. Pertama, dengan segera mengesahkan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). "Inisiatif ini perlu segera dilakukan mengingat dalam RUU KUHP sudah memuat aturan pidana yang berkaitan dengan LGBT"



## **FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

*Kreatif, Atraktif, Substantif*

**Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA**  
Ketua Fraksi PKS DPR RI

**Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T**  
Sekretaris Fraksi PKS DPR RI



# Ketua Fraksi PKS: Pelaksanaan Otonomi Daerah Jangan Setengah Hati

## KUTIPAN

Jakarta (23/05) --- Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini, menegaskan komitmen PKS untuk memperkokoh kewenangan daerah dalam kerangka otonomi daerah di Indonesia.

Hal itu disampaikan dalam pembukaan salah satu Program Unggulan Fraksi PKS DPR RI, Mimbar Demokrasi dan Kebangsaan, yang mengangkat tema 'Kebangkitan Ekonomi Daerah: Masa Depan Indonesia', Senin (23/05).

"Mengingat, negara Indonesia ini sangat luas, jika kita ingin mewujudkan pemerataan di republik ini, maka harus ada distribusi-distribusi kewenangan dan tugas dari pemerintah pusat melalui otonomi daerah", papar Jazuli.

Menurut Anggota Komisi I DPR RI ini, Pemerintah pusat tidak boleh mengекang dan mengambil alih kewenangan



kewenangan daerah, karena ini bertentangan dengan tujuan pemerataan dan pembangunan ekonomi bagi seluruh rakyat.

"Tidak mungkin pemerintah pusat memahami secara detail apa yang ada di setiap wilayah republik ini secara utuh. Di sinilah pentingnya otonomi daerah. Kita harus jujur berbicara tentang otonomi daerah," tegasnya.

Menurutnya, pelaksanaan otonomi daerah jangan

setengah hati, saat pemerintah pusat seakan tidak ikhlas memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah.

"Pemerintah daerah disuruh running dan maju cepat, tapi tidak dilepas. Ini seperti sapi disuruh lari, dipecut, tapi ekornya dipegang. Saya kira, itu adalah suatu paradoks yang tak boleh terjadi", paparnya lagi.

Jazuli pun menyebut beberapa UU yang dalam pandangan Fraksi PKS bertentangan dengan semangat desentralisasi dalam otonomi daerah.

"Makanya, beberapa waktu lalu, Fraksi PKS menolak tegas disahkannya UU Omnibus Law, disahkannya UU HKPD.

Kenapa? Karena dalam kedua UU itu, setelah kita cermati, banyak klausul pasal yang ingin merebut kembali kewenangan pemerintah daerah, ditarik menjadi sentralistik di pemerintah pusat", tegas politisi senior PKS tersebut.

Oleh sebab itu, imbuh Jazuli, Fraksi PKS terus mendorong pemerataan pembangunan dengan memberikan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah secara konsekuen, secara tulus, secara ikhlas, dan secara bertanggung jawab.



**Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA**

Ketua Fraksi PKS DPR RI

"Pelaksanaan otonomi daerah jangan setengah hati, saat pemerintah pusat seakan tidak ikhlas memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah. "Pemerintah daerah disuruh running dan maju cepat, tapi tidak dilepas. Ini seperti sapi disuruh lari, dipecut, tapi ekornya dipegang. Saya kira, itu adalah suatu paradoks yang tak boleh terjadi"



# Presiden PKS: Ekonomi Daerah **Kontributor** Pembangunan Nasional

## KUTIPAN

Jakarta (23/05) --- Presiden PKS sekaligus Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Ahmad Syaikh, menegaskan bahwa ekonomi daerah adalah salah satu pilar utama dalam pembangunan nasional.

Hal itu disampaikan dalam pembukaan salah satu Program Unggulan Fraksi PKS DPR RI, Mimbar Demokrasi dan Kebangsaan, yang mengangkat tema "Kebangkitan Ekonomi Daerah: Masa Depan Indonesia", Senin (23/05).

"Pasca reformasi 1998, peran pemerintah daerah berubah dari sekadar pelengkap pembangunan nasional, menjadi faktor yang memiliki peran strategis dalam menopang pembangunan nasional. Pemda tidak lagi pasrah atas keputusan pusat, tetapi sebaliknya, pemerintah daerah memiliki peran yang krusial dalam menentukan arah pembangunan", ungkap Syaikh.

Dalam paparannya, Syaikh menjelaskan tiga poin penting yang dapat menjadi modal sekaligus faktor penentu



pembangunan.

"Pertama, ekonomi daerah memiliki sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang sangat berlimpah. Dan setiap daerah memiliki keunikan, keistimewaan, dan keunggulan komparatif dan kompetitif yang berbeda-beda. Kedua, bisa disamakan antar daerah satu sama lain. Keaneekaragaman inilah yang menjadi keunggulan komparatif dan kompetitif sebagai pijakan untuk membangun daya saing di level nasional maupun global", jelasnya.

Selain itu, Syaikh menilai daerah dapat menjadi kawasan ekonomi baru melalui serangkaian pembangunan

sarana dan prasarana pendukung lainnya.

"Ekonomi daerah merupakan sumber ekonomi baru. Jika Pemerintah daerah mampu memetakan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif dari daerahnya, tentu daerah akan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi pertumbuhan nasional. Di titik inilah, kreativitas, inovasi dari pemerintah daerah akan sangat menentukan keberhasilan dan kebangkitan ekonomi Indonesia", lanjutnya.

Syaikh mengingatkan agar ekonomi daerah jangan hanya bergantung pada pendanaan fiskal dari negara. "Pemerintah daerah harus mampu melakukan akselerasi pembangunan. Pemerintah daerah tidak boleh memosisikan diri sebagai beban pembangunan, tetapi justru wajib menjadi kontributor pembangunan nasional", paparnya.

Oleh sebab itu, imbuh Syaikh, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dan peran besar dalam memajukan ekonomi daerahnya masing-masing.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



**H. AHMAD SYAIKHU**  
Presiden PKS

"Ekonomi daerah merupakan sumber ekonomi baru. Jika Pemerintah daerah mampu memetakan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif dari daerahnya, tentu daerah akan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi pertumbuhan nasional. Di titik inilah, kreativitas, inovasi dari pemerintah daerah akan sangat menentukan keberhasilan dan kebangkitan ekonomi Indonesia"



# Gubernur NTB: Potensi Daerah Perlu Dimaksimalkan untuk Dorong Pertumbuhan Ekonomi

## KUTIPAN

Jakarta (23/5) --- Gubernur Nusa Tenggara Barat, Zulkieflimansyah, membagikan pengalaman ketika berhasil menyelenggarakan event dunia sebesar MotoGP di Mandalika, NTB.

Hal itu disampaikan dalam pembukaan salah satu Program Unggulan Fraksi PKS DPR RI, Mimar Demokrasi dan Kebangsaan, yang mengangkat tema "Kebangkitan Ekonomi Daerah: Masa Depan Indonesia", Senin (23/05/2022).

Menurut Zulkieflimansyah, potensi daerah tetap dapat dikembangkan oleh pemerintah daerah, meskipun dampak kelulusan ekonomi akibat pandemi covid-19 masih terjadi.

"Pandemi covid-19 hendaknya dapat dilihat sebagai sebuah berkah terselubung. Kondisi tersebut menyadarkan kita bahwa



ternyata ada cara lain dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah, tanpa menyandarkan sepenuhnya pada APBD, yakni dengan memaksimalkan potensi-potensi lain daerah", ujar Zulkieflimansyah.

Ia mencontohkan keberhasilan pelaksanaan MotoGP Mandalika beberapa waktu lalu, yang berdampak signifikan terhadap kemajuan daerah.

"Penyelenggaraan ajang

multi event kelas dunia di NTB, MotoGP, telah mendorong akselerasi pembangunan infrastruktur, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta transformasi budaya masyarakat NTB", ujar pria yang akrab disapa Bang Zul tersebut.

Ia menyebut, dalam tiga hari penyelenggaraannya, ajang MotoGP Mandalika telah mengerek ekonomi NTB tumbuh sebesar 8% dan mendorong peredaran uang masuk sebesar 607 miliar rupiah ke daerah NTB.

Terakhir, Bang Zul menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan dalam ajang multi event dunia lalu tersebut ialah hasil dari kerja sama seluruh pihak.

"Kunci dalam pembangunan daerah adalah bagaimana membangun kolaborasi, sinergitas, dan harmoni lintas sektoral, pemerintah pusat dan daerah, sektor publik dan swasta, dan sebagainya", pungkasnya.



**Dr. ZULKIEFLIMANSYAH**  
Gubernur NTB

"Pandemi covid-19 hendaknya dapat dilihat sebagai sebuah berkah terselubung. Kondisi tersebut menyadarkan kita bahwa ternyata ada cara lain dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah, tanpa menyadarkan sepenuhnya pada APBD, yakni dengan memaksimalkan potensi-potensi lain daerah",

Mimbar Demokrasi FPKS,

# Presiden i-Otda: Pelaksanaan Otonomi Daerah **Banyak Hambatan**

**KUTIPAN**

Jakarta (23/05) --- Pakar Otonomi Daerah, Djohermansyah Johan, menegaskan pentingnya pelaksanaan otonomi daerah secara konsekuen demi menciptakan pertumbuhan ekonomi.

Hal itu disampaikan dalam pembukaan salah satu Program Unggulan Fraksi PKS DPR RI, Mimbar Demokrasi dan Kebangsaan, yang mengangkat tema 'Kebangkitan Ekonomi Daerah: Masa Depan Indonesia', Senin (23/05/2022).

Menurut Johan, saat ini masih cukup banyak hambatan bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

"Desentralisasi ekonomi belum berjalan dengan baik karena belum tuntasnya permasalahan desentralisasi politik, desentralisasi administrasi, dan desentralisasi fiskal", ungkap Presiden Institut Otonomi Daerah tersebut.

Pemerintah pusat,



imbuhnya, perlu berhati-hati dalam merumuskan kewajiban pusat-daerah. Jangan sampai kebijakan yang diputuskan bertentangan dengan prinsip keadilan bagi daerah.

"Fenomena resentralisasi dan de-otonomisasi dalam produk legislasi nasional telah menghambat gerak laju kemandirian ekonomi di daerah", tegasnya.

Di saat yang sama, ia pun mengkritisi kegagalan banyak daerah dalam mencapai kemandirian ekonomi.

"Saat ini, sebagian besar penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia belum mandiri secara fiskal, sehingga pembiayaan APBD sangat bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat", paparnya.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa otonomi daerah ditujukan untuk penguatan dan pendalaman demokrasi di daerah. Maka, merupakan suatu hal yang kontradiktif apabila otonomi daerah justru memperlemah proses demokratisasi.

"Pelaksanaan otonomi daerah harus berkorelasi dengan peningkatan pelayanan publik, yang intinya adalah untuk pemenuhan kepentingan rakyat di daerah", pungkasnya.

"Otonomi daerah ditujukan untuk penguatan dan pendalaman demokrasi di daerah. Maka, merupakan suatu hal yang kontradiktif apabila otonomi daerah justru memperlemah proses demokratisasi. Pelaksanaan otonomi daerah harus berkorelasi dengan peningkatan pelayanan publik, yang intinya adalah untuk pemenuhan kepentingan rakyat di daerah"



## Prof. Dr. DJOHERMANSYAH JOHAN, MA

Pakar Otonomi Daerah, Presiden i-Otda

**Bimtek**  
nas

**ALEG PEREMPUAN  
DPRD PKS  
SE-INDONESIA**

JAKARTA  
020 - 2020  
JUNI 2020  
Kelembagaan, Kebijakan & Anggaran  
Pengembangan PKS Perempuan

**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

*Kecatif, Abrakif, Sejahterif*



Aleg Perempuan  
**FRAKSI PKS**  
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

**Anis** Byarwati | **Ledia** Hanifa | **Kurniasih** Mufidayati  
**Saadiah** Uluputty | **Nur Azizah** | **Diah** Nurwitasari | **Sakinah** Aljufri  
**Nevi** Zuairina | **Netty** Prasetyani

# Wakil Ketua FPKS: Kedubes Inggris **Harusnya** Hormati Sikap Bangsa Indonesia yang Anti LGBT

## KUTIPAN

Menurut Sukamta, LGBT tetap tergolong penyakit mental yang dapat merusak tatanan sosial. Lebih jauh lagi bisa merusak peradaban suatu bangsa, karena terkait juga dengan disfungsi regenerasi.

Jakarta (21/05) — Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Sukamta, menanggapi pengibaran bendera pelangi yang biasa diidentikan dengan bendera dukungan terhadap LGBT di kantor Kedutaan Besar Inggris, Sabtu (21/05).

"Memang betul Kedubes Inggris memiliki hak untuk mengibarkan bendera, karena kantor Kedubes itu masuk wilayah ekstrateritorial Inggris. Tapi, mereka harusnya menghormati sikap bangsa Indonesia yang anti terhadap LGBT, karena bertentangan dengan Pancasila. Mereka harusnya sadar bahwa ini isu yang sensitif, apalagi beberapa waktu lalu hal ini menghambat akibat salah satu konten

podcast youtuber Indonesia menampilkan pelaku LGBT untuk menerangkan tentang perilaku mereka," jelas Sukamta.

Ketua DPP PKS Bidang Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri (BPPLN) ini menegaskan bahwa LGBT ini tetap merupakan sebuah penyakit mental, dan bisa menular, meski WHO mencabut LGBT dari daftar penyakit. LGBT bukan hak asasi manusia.

Menurut Sukamta, LGBT tetap tergolong penyakit mental yang dapat merusak tatanan sosial. Lebih jauh lagi bisa merusak peradaban suatu bangsa, karena terkait juga dengan disfungsi regenerasi.

"Karena itu, pemerintah RI

harus tegas, dan melayangkan protes keras kepada Kedubes Inggris, meski mereka sudah menurunkan bendera tersebut. Sikap tegas ini sangat diperlukan agar menjadi efek jera bagi negara lain untuk tidak lagi mengulangi show up dukungan terhadap LGBT dengan menggunakan simbol bendera, misalnya, meski di wilayah ekstrateritorial mereka sendiri," tegas wakil rakyat dari Daerah Istimewa Yogyakarta ini.



## H. SUKAMTA, Ph.D

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Di Yogyakarta

Pemerintah RI harus tegas, dan melayangkan protes keras kepada Kedubes Inggris, meski mereka sudah menurunkan bendera tersebut. Sikap tegas ini sangat diperlukan agar menjadi efek jera bagi negara lain untuk tidak lagi mengulangi show up dukungan terhadap LGBT dengan menggunakan simbol bendera



Protes Kedubes Inggris  
Kibarkan Bendera LGBT

## PKS Ungkit soal Penyakit Seksual

KUTIPAN

Jakarta - Pengibaran bendera LGBT di Kedubes Inggris di Jakarta menimbulkan polemik. PKS memprotes keras pengibaran bendera LGBT tersebut.

Ketua Polhukam DPP PKS AI Muzammil Yusuf sudah menduga sikap Kedubes Inggris yang lebih condong mendukung LGBT. Muzammil menyebut hal itu bukan pertama kali terjadi.

"Pada 2018-2019 lalu saat pembahasan RUU KUHP di DPR terkait pasal tentang LGBT ada 22 Dubes Eropa datang ke DPR yang intinya menolak jika LGBT 'diharamkan' di Indonesia," ujar Muzammil ketika dihubungi, Sabtu (21/5/2022).

"Mereka, Dubes Eropa menganggap LGBT itu HAM," lanjutnya.

Dia menyebut negara-negara barat yang mengaku negara demokratis tidak mau mengakui hak rakyat Indonesia untuk mengatur hukum sesuai budaya bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 45. Dia kemudian mengungkit soal penyakit

tatanan keluarga di negara-negara luar barat yang lebih kokoh dan lebih bersih penyakit kelamin.

"Barat harusnya lebih rendah hati untuk melihat bahwa tatanan keluarga di negara timur (di luar barat) lebih kokoh, harmonis, bahagia dan lebih bersih dari berbagai penyakit seksual," ujar Muzammil.

"Barat harusnya mau rendah hati untuk belajar dari etika dunia timur terkait masalah etika seksual dan harmoni keluarga. Bukan malah sebaliknya," sambungnya.

Sebelumnya, kantor Kedutaan Besar Inggris untuk Indonesia yang berkedudukan di Jakarta sempat mengibarkan bendera pelangi LGBT. Namun kini bendera LGBT itu telah dicopot dan diganti dengan bendera Ukraina.



**Dr. H. ALMUZAMMIL YUSUF, M.Si.**

Anggota Komisi I DPR RI

"Barat harusnya lebih rendah hati untuk melihat bahwa tatanan keluarga di negara timur (di luar barat) lebih kokoh, harmonis, bahagia dan lebih bersih dari berbagai penyakit seksual. Barat harusnya mau rendah hati untuk belajar dari etika dunia timur terkait masalah etika seksual dan harmoni keluarga. Bukan malah sebaliknya."



# Komisi III DPR Desak Pelaku KDRT di Jakbar Segera Dipenjara

## KUTIPAN

Jakarta (24/05) --- Anggota Komisi III DPR RI, Achmad Dimiyati Natakusumah mendesak pihak Polsek Tanjung Duren segera menangkap pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) Eko Soleh Supriyono (40) terhadap anaknya Muhammad Raeyhan Irfansyah (16), warga Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, Jakarta Barat

Dimiyati meminta Polsek Tanjung Duren bisa kerja cepat memproses kasus tersebut sehingga pelaku bisa segera diseret ke meja hijau dan selanjutnya dipenjara untuk mempertanggung jawabkan tindakannya.

"Itu sudah sangat keterlaluhan yang dilakukannya (pelaku)," kata Dimiyati kepada wartawan, Selasa (24/5/2022).

Lebih jauh, Politisi PKS ini menilai, tindakan pelaku sangat tidak manusiawi karena telah melakukan tindakan KDRT tersebut selama bertahun-tahun.

Apalagi, lanjut Dimiyati,

kejadian KDRT itu juga menimpa kepada sang adik Miftahurrizki Ananda (14) juga mengalami hal serupa. Dimana, penganiayaan kepada Nanda lebih banyak, bahkan terjadi dua kali.

"Ini sangat tidak manusiawi dan kena delik pidana," tegasnya.

Diketahui, Muhammad Raeyhan Irfansyah (16), warga Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, telah bertahun-tahun jadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) oleh bapaknya sendiri, Eko Soleh Supriyono (40).

Terakhir kali kekerasan diterima siswa kelas 1 SMK ini pada Selasa 17 Mei dini hari lalu. Sang bapak memberikan bogem mentah ke pelipisnya sebanyak tiga kali.

"Dan perut disabet satu kali pakai paralon," kata Raeyhan kepada wartawan, Senin (23/5/2022).

Korban bersama ibunya Nurul Komariyah (38), sempat melapor ke Polsek Tanjung Duren. Istrinya juga jadi bulan-bulanan pelaku. Kini mereka mengungsi di kediaman pamannya, Fatah Sidik, di Kota Depok. Korban mengaku trauma dengan sosok bapaknya dan tidak mau bertemu Eko.

"Intinya, (mau) enggak ada Bapak. Kalau lihat Bapak, auranya sudah beda aja, kayak seram. Jadi, kayak orang ketakutan, gitu," tegasnya.



**DR. H. R. A. DIMYATI  
NATAKUSUMAH, SH, MH**

Anggota Komisi III DPR RI

"Tindakan pelaku sangat tidak manusiawi karena telah melakukan tindakan KDRT tersebut selama bertahun-tahun. Apalagi, kejadian KDRT itu juga menimpa kepada sang adik Miftahurrizki Ananda (14) juga mengalami hal serupa. Dimana, penganiayaan kepada Nanda lebih banyak, bahkan terjadi dua kali. Ini sangat tidak manusiawi dan kena delik pidana"



# Habib Aboe **Apresiasi** Program Politik Cerdas Berintegritas Terpadu yang Digagas KPK

## KUTIPAN

Jakarta (18/05) --- Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Aboebakar Alhabsyi menanggapi program Politik Cerdas Berintegritas Terpadu milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kami menyambut baik Program Politik Cerdas Berintegritas Terpadu yang digagas oleh KPK," ungkap pria yang akrab disapa Habib Aboe ini.

Hal ini, lanjut Habib Aboe, adalah langkah baik dalam upaya pencegahan korupsi di sektor politik. Upaya preventif seperti ini memang diperlukan.

Oleh karenanya, saya secara langsung datang dan tidak mewakilkan pada acara ini. Hal tersebut adalah bentuk dukungan kita terhadap program yang digagas KPK ini. Sekaligus juga komitmen kita dalam upaya pencegahan

tindak pidana korupsi," tegas Sekjen DPP PKS ini.

Sebagai partai yang lahir paska reformasi, kata Habib Aboe, PKS memahami betul semangat reformasi untuk memberantas Korupsi, kolusi dan nepotisme.

"Kita memiliki kesadaran bersama, bahwa korupsi adalah salah satu rintangan dari bangsa ini untuk mencapai kemajuan," tandas Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan ini.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



## HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI

Sekjen DPP PKS

"Sebagai partai yang lahir paska reformasi, PKS memahami betul semangat reformasi untuk memberantas Korupsi, kolusi dan nepotisme. Kita memiliki kesadaran bersama, bahwa korupsi adalah salah satu rintangan dari bangsa ini untuk mencapai kemajuan"

# Dukung Imbauan Kejagung Anggota DPR Anggap Atribut Keagamaan Kerap Dimanfaatkan Terdakwa

**KUTIPAN**

Jakarta (19/05) — Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil mendukung imbauan Kejaksaan Agung (Kejagung) kepada para terdakwa agar tidak mengenakan atribut keagamaan yang tidak dikenakan sehari-hari, saat menjalani persidangan.

Nasir berpandangan, atribut keagamaan yang dikenakan para terdakwa di ruang sidang kerap kali dimanfaatkan terdakwa supaya mereka terlihat telah bertobat atau menyesali perbuatan yang dilakukan.

"Ada kesan seolah-olah atribut keagamaan itu 'dipaksakan' atau 'dimanfaatkan' untuk kepentingan pribadi atau seolah-olah sudah "bertobat" dari kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut," kata

Nasir kepada wartawan, Rabu (18/5/2022).

Nasir pun mengaku heran mengapa terdakwa kerap mengenakan atribut-atribut keagamaan seperti kopiah haji, baju koko, kerudung, bahkan cadar saat menghadiri persidangan.

Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, penggunaan atribut tersebut dapat menyudutkan umat agama tertentu.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

**H.M. NASIR DJAMIL, M.Si**

Anggota Komisi III DPR RI

"Ada kesan seolah-olah atribut keagamaan itu 'dipaksakan' atau 'dimanfaatkan' untuk kepentingan pribadi atau seolah-olah sudah "bertobat" dari kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut,"



Tren Inflasi Makin Mengkhawatirkan

# PKS: Pemerintah Harus Menjaga Stabilitas Harga dan Daya Beli Masyarakat

Angka inflasi bulan April sudah melampaui asumsi dalam APBN 2022 sebesar 3 %.

- Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik, **tren inflasi bulanan terus meningkat sejak awal tahun 2022**, dari 0,56 % pada Januari 2022 menjadi 0,95 % di April 2022.
- **Inflasi dapat mencapai angka 5 % - 6 % di tahun ini**, apabila Pemerintah melanjutkan rencananya untuk menaikkan harga Pertalite, LPG 3 kg, dan tarif listrik.



# Masuk Musim Giling 2022, Aleg PKS Minta Produksi Gula Tahun Ini Dapat Menekan Importasi

## KUTIPAN

Jakarta (19/05) --- Memasuki musim giling tebu untuk memproduksi gula oleh berbagai pabrik gula di tanah air pada tahun 2022 ini, Anggota DPR RI Komisi IV, Andi Akmal Pasluddin meminta pemerintah dapat mencapai target produksi gula yang dapat menekan importasi.

Dengan kondisi goncangnya perekonomian di berbagai negara, yang membuat tidak kondusifnya situasi perekonomian global, memaksa setiap negara dapat memenuhi kebutuhan pangannya dari produksi dalam negeri.

Akmal mengingatkan pemerintah, bahwa tahun 2022, pemerintah mengalokasikan importasi kepada perusahaan negara bidang pergulaan sebesar 250 ribu ton dengan rincian 150 ribu ton gula kristal putih (GKP) serta 100 ribu ton raw sugar. Sedangkan pada awal februari 2022, holding pabrik gula milik BUMN, PT Perkebunan

Nusantara (PTPN) mengimpor sebanyak 25 ribu ton gula mentah (raw sugar).

"Saya harap musim giling di berbagai pabrik gula yang mulai di bulan mei ini dapat meningkatkan cadangan gula nasional secara signifikan sehingga di kemudian hari dapat menekan angka importasi", tutur Akmal.

Politisi PKS ini mengatakan, industri pergulaan nasional akan lebih kompetitif bila pemerintah memberikan dukungan penuh pada proses produksi gula baik untuk keperluan industri maupun konsumsi rumah tangga. Situasi pemenuhan bahan baku gan-

dum pada produksi makanan minuman yang akan sulit di kemudian hari akibat larangan ekspor gandum india, jangan sampai gula sebagai komponen produksi makanan minuman dalam kemasan juga sulit.

"Saya membaca di beberapa surat kabar bahwa PTPN X menargetkan menggiling tebu sejumlah 4,25 juta ton dengan total produksi gula 340.375 ton. PTPN VII Cinta Manis, menargetkan produksi gula kristal sebesar 112 ribu ton gula kristal. Belum lagi pabrik-pabrik gula lain yang tersebar di Indonesia. Mestinya, semua target-target ini bila tercapai, akan berdampak positif pada cadangan gula nasional untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri baik industri maupun konsumsi", urai Akmal.

Legislator Asal Sulawesi Selatan II ini mengatakan, dimasa yang akan datang, pemerintah mesti juga dapat memberikan kontribusinya pada pengawasan penyerapan gula.

Selengkapnya kunjungi  
fraksi.pks.id



**Dr. H. ANDI AKMAL  
PASLUDDIN, S.P., M.M**  
Anggota Komisi IV DPR RI

"Saya berharap, di musim giling tebu ini, jangan sampai kejadian pada TBS pada komoditas minyak goreng yang harganya jatuh membuat petani menderita. Harga tebu di tingkat petani diharapkan sesuai dengan harapan petani tebu sehingga semangat untuk menanam tebu pada masa tanam berikutnya dapat bertahan sehingga keberlanjutan produksi gula nasional dapat ditingkatkan terus menerus"



# Demo Pegawai Perhutani, Aleg PKS : Kebijakan Pemerintah **Jangan** **Kapitalistik**

## KUTIPAN

Jakarta (19/05) --- Aksi demo gabungan 5000 pegawai Perhutani dari empat provinsi, Jatim, Jateng, Jabar dan Banten, kemarin (18/5) bertujuan memprotes SK.287/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2022 tentang Penetapan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus seluas 1 juta hektar.

Kebijakan ini dinilai telah menimbulkan keresahan di masyarakat. Hutan yang ada sekarang, nantinya akan diambil alih oleh kelompok tertentu atau jatuh ke tangan pengusaha kapitalis yang akan menguasai hutan untuk tujuan keuntungan korporat, bukan untuk kepentingan rakyat.

Menanggapi hal tersebut, legislator PKS, Slamet menyatakan agar kebijakan Pemerintah dalam rangka memanfaatkan hasil hutan jangan bersifat kapitalistik.

"Pemerintah harus mengikutsertakan masyarakat

di kawasan hutan yang selama ini sudah lebih dulu ada dan pemerintah daerah dalam pembangunan hutan, jangan mengusir yang sudah ada, tapi membina kearah yang diinginkan," ujarnya di Jakarta, Kamis (19/05).

Hal itu, kata Slamet, hanya akan menciptakan konflik horizontal yang berkepanjangan jika pemerintah pusat tanpa koordinasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat.

"Ujug-ujug memberi hak kepada orang dari luar untuk menguasai lahan sama saja dengan pendudukan atau

penjajahan," terang Slamet.

"Jika pola ini dibenarkan maka akan terjadi pendudukan atau penjajahan baru di tanah air, khususnya di kawasan hutan. Belum lagi jika izin itu diberikan kepada perusahaan milik asing atau dijual kepada orang asing, ini sangat rawan," imbuhnya.

Untuk itu, imbau Slamet, pemerintah harus memperbaiki mekanisme kerjanya dengan menghindari konflik horizontal dengan penduduk asli atau pengelola kawasan hutan.

Pembangunan harus terus dilakukan, tapi juga harus menghindari konflik apalagi dengan masyarakat. Kekayaan negara jangan sampai mengalir ke negara lain melalui jalan manapun, semangat untuk menjahterakan dan memakmurkan bangsa senantiasa harus diutamakan.

Anggota Komisi IV DPR asal FPKS ini mengingatkan bahwa arah pembangunan ekonomi dalam konstitusi kita adalah UUD pasal 33 yang menyebutkan asas kekeluargaan, kebersamaan, kemakmuran rakyat.



**drh. H. SLAMET**  
Anggota Komisi IV DPR RI

“Pemerintah harus mengikutsertakan masyarakat di kawasan hutan yang selama ini sudah lebih dulu ada dan pemerintah daerah dalam pembangunan hutan, jangan mengusir yang sudah ada, tapi membina kearah yang diinginkan

# Legislator PKS Minta MUI Keluarkan Fatwa Pelaksanaan Kurban Ditengah Wabah PMK

## KUTIPAN

Jakarta (24/05) --- Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKS, Hermanto meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) agar mengeluarkan fatwa terkait pelaksanaan penyembelihan hewan kurban ditengah wabah (PMK) di Indonesia.

Hermanto mengungkapkan, dalam Rapat Kerja Komisi IV, Menteri Pertanian menyampaikan Wabah PMK sudah terdeteksi di 82 kabupaten/kota pada 16 propinsi. Sampai tanggal 22 Mei 2022 telah terdapat 5,454.454 dari 13.841.258 ekor populasi sapi dan kerbau terdampak PMK.

"Fatwa MUI tentang hewan kurban yang memenuhi syariat Islam ditengah wabah PMK tentu ditunggu oleh masyarakat. Fatwa tersebut mendesak dikeluarkan agar timbul rasa aman dan tenang dikalangan umat Islam yang menunaikan ibadah kurban," tutur Hermanto dalam keterangan tertulisnya.

Terkait dengan wabah

PMK, lanjut Hermanto, Menteri Pertanian telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang pelaksanaan kurban dan pemotongan hewan dalam situasi wabah PMK.

"SE ini harus segera disebar. SE ini bisa menjadi input bagi Fatwa MUI sekaligus pedoman bagi peternak dan masyarakat dalam transaksi jual beli hewan kurban sapi, kerbau dan kambing," tutur Legislator dari FPKS DPR RI ini.

Hermanto juga minta kepada Menteri Pertanian agar jangan sampai PMK dijadikan sebagai isu perang dagang mengingat sebentar lagi masyarakat muslim akan merayakan Hari Raya Idul Adha 1443H.

"Menjelang dan saat hari

raya Idul Adha tentu terjadi peningkatan permintaan sapi, kerbau dan kambing untuk keperluan kurban. Isu PMK jangan jadi alasan masuknya sapi/kerbau impor ke Indonesia. Bila hal itu terjadi maka tentu akan sangat merugikan peternak lokal," paparnya.

"Beri peluang pasar jelang Idul Adha bagi peternak lokal agar bisa meraih keuntungan," tambah Hermanto.

Selain itu, Hermanto juga meminta Menteri Pertanian agar secara serius menangani wabah PMK agar penyebarannya tidak meluas dengan cara: memberikan vaksin, membatasi mobilitas sapi/kerbau serta memperkuat sistem dan pelaksanaan kerja karantina hewan di setiap pintu masuk dan perbatasan.

"Pengendalian tidak hanya pada ruang gerak hewan di daerah-daerah tetapi juga mencegah masuknya hewan sapi/kerbau dalam bentuk hidup, daging mentah maupun olahan dari luar negeri," pungkas Legislator dari Dapil Sumbang I ini.



**Dr. HERMANTO, S.E., M.M**

Anggota Komisi IV DPR RI

"Fatwa MUI tentang hewan kurban yang memenuhi syariat Islam ditengah wabah PMK tentu ditunggu oleh masyarakat. Fatwa tersebut mendesak dikeluarkan agar timbul rasa aman dan tenang dikalangan umat Islam yang menunaikan ibadah kurban,"



# Tanggulangi Wabah PMK, Aleg PKS **Usulkan** Pemerintah Beri Kompensasi Khusus bagi Peternak

## KUTIPAN

Jakarta (24/05) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan menyalahkan bobolnya pertahanan Indonesia dari serangan PMK (penyakit mulut dan kuku) bagi hewan ternak.

Menurut Johan, hal ini patut dipertanyakan, terutama sebaran wabah yang sangat cepat di seluruh pelosok negeri.

"Saya Mempertanyakan kinerja Pemerintah dalam hal monitoring dan evaluasi (mon-ev) tentang PMK ini. Kementan harus menyampaikan data movev PMK dari hasil tes Lab selama lima tahun terakhir, hal ini untuk melihat kemampuan kewaspadaan dini negara kita dari serangan wabah PMK sehingga hari ini menjadi wabah yang menaakutkan semua orang" ujar Johan saat mengikuti Raker Komisi IV dengan Menteri Pertanian di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin, (23/05/2022).

Johan menambahkan bahwa ada dugaan selama ini

pemerintah abai melakukan kewaspadaan melalui tes PMK pada hewan ternak sehingga Ketika muncul kasus dan dilakukan testing yang cukup masif maka terbukti di banyak provinsi telah terjangkit wabah PMK.

Untuk itu, Politisi PKS ini mengusulkan agar pemerintah memberikan kompensasi khusus kepada peternak untuk menanggulangi penyakit PMK karena saat ini telah menyebar ke 15 provinsi dan perlu diwaspadai akan terus meluas jika tidak ada Langkah jitu untuk memutus rantai penyebarannya. "Maksud dari Kompensasi ini bertujuan untuk melindungi peternak agar mereka mau melaporkan sapi yang sakit atau mengalami gejala tertentu, ini sebagai strategi Kerjasama

untuk melindungi dan menjaga kesejahteraan peternak yang rugi akibat PMK dan sekaligus upaya jitu untuk mengendalikan PMK karena hewan yang sakit dapat segera dimusnahkan agar tidak menyebar luas"ucap Johan.

Legislator Senayan ini meminta pemerintah tidak meremehkan dampak sebaran PMK ini dengan hal-hal yang hanya bersifat simbolik dengan kampanye makan sate dan lain-lain serta panduan penanganan yang keliru seperti pemberian obat dan vitamin bagi ternak yang sakit.

"Saya minta Menteri Pertanian mengutip pendapat dari ahli kesehatan hewan, yang perlu dipahami bahwa ternak yang terinfeksi PMK memang bisa sembuh namun virus tetap bertahan dalam tubuhnya sehingga menjadi 'carrier' (pembawa) virus PMK ke hewan lain yang sehat, sehingga Langkah yang diambil adalah hewan terinfeksi PMK wajib dipotong dan diberikan ganti rugi berupa dana kompensasi kepada semua peternak" cetus Johan. Wakil Rakyat dari Dapil



**H. JOHAN ROSIHAN, S.T**

Anggota Komisi IV DPR RI

"Kementan harusnya merangkul semua stakeholders untuk bahu membahu mencegah hewan terinfeksi serta mengontrol pergerakan hewan secara akurat dan bukan memilih metode pengobatan dan penyemprotan kandang dengan disinfektan",

NTB 1 ini menilai Pemerintah telah gagal melakukan deteksi dini sehingga penyebaran PMK terjadi begitu cepat.

"Sebentar lagi akan masuk moment Idul Adha dan Pemerintah harus punya konsep untuk mengontrol pergerakan sapi yang berasal dari daerah wabah tidak masuk ke Kawasan yang masih bebas PMK.

Penutupan jalur lalu lintas ternak secara menyeluruh juga pasti berdampak merugikan peternak pada moment Idul Adha sehingga kontrol ketat pergerakan secara akurat penting untuk dilakukan" urai Johan.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

# Aleg PKS : Indonesia Masih Jauh dari Akses Sanitasi dan Air Minum Aman

## KUTIPAN

Jakarta (23/05) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Suryadi Jaya Purnama menanggapi perhelatan Sector Ministers Meeting (SMM) Sanitation and Water for All (SWA) 2022 yang dilaksanakan pada (18-19/05/2022) di Jakarta, Indonesia.

Sebagai tuan rumah, imbuH Suryadi, Indonesia tidak hanya wajib melaksanakan acara tersebut, namun juga harus mampu mengimplementasikan segala kesepakatan yang dihasilkan.

"SWA sendiri adalah kemitraan multi-pemangku kepentingan global yang diselenggarakan oleh PBB dan mitra mereka dari masyarakat sipil, sektor swasta, badan-badan PBB, lembaga penelitian dan pembelajaran, bank pembangunan dan komunitas donor, untuk mencapai Tujuan ke-6 Pembangunan Berkelanjutan yaitu menjamin ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua," terang pria yang akrab disapa SJP ini.

SJP menambahkan,

Wapres Ma'ruf Amin mengungkapkan bahwa di Indonesia akses terhadap air minum layak telah menjangkau lebih dari 90% penduduk, tetapi capaian akses air minum aman baru sekitar 11%. Untuk akses sanitasi, saat ini sekitar 80% penduduk mempunyai akses sanitasi layak, sedangkan sanitasi aman baru dinikmati oleh sekitar 7%.

"Sampai saat ini, Indonesia sendiri masih sangat tertinggal dari banyak negara tetangga ASEAN di sektor sanitasi dan air minum. Menurut data Joint Monitoring Program (JMP) WHO-Unicef pada tahun 2017 Indonesia menduduki peringkat kedua dari bawah untuk wilayah ASEAN terkait akses sanitasi. Dimana akses sanitasi Indonesia pada saat itu baru

75%, sedangkan negara ASEAN lain seperti Malaysia, Thailand dan Singapura sudah memiliki akses 100%," papar Anggota DPR RI dari Dapil NTB ini.

Bahkan Filipina, tegasnya, pada saat itu telah mencapai 91% akses sanitasi. Walaupun demikian menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada tahun 2020 mencatat Indonesia telah mencapai 79,5 persen untuk akses sanitasi layak, termasuk 7,6 persen untuk sanitasi aman, serta capaian BABS sebesar 6,2 persen.

"Sedangkan di sektor air minum Indonesia juga berada di peringkat kedua dari bawah menurut data Joint Monitoring Program (JMP) WHO-Unicef pada tahun 2017. Pada data tersebut disebutkan bahwa Indonesia baru memenuhi akses layak dasar air minum sebesar 89%, padahal negara tetangga seperti Malaysia telah mencapai 90% akses aman dan hanya 3% penduduk Malaysia yang memiliki akses layak dasar air minum", pungkasnya.

Negara ASEAN lain seperti Filipina pun, imbuH SJP, memiliki peringkat di atas Indonesia dimana 47% penduduknya telah



**H. SURYADI JAYA PURNAMA, S.T.**

Anggota Komisi V DPR RI

"FPKS meminta Pemerintah dapat memprioritaskan pembangunan infrastruktur untuk sektor sanitasi dan air minum ini, selain itu Pemerintah juga harus melakukan edukasi pada masyarakat guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya sanitasi yang baik"

mendapatkan akses aman air minum dan 47% lainnya mendapatkan akses layak dasar.

"Sementara itu menurut Susenas 2020 tercatat dimana akses

air minum layak telah mencapai 90,2%, dimana 11,9% diantaranya merupakan akses air minum aman," sebut SJP.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

# Aleg PKS Dukung Penegakan Hukum terhadap Mafia Ekspor dan Impor Komoditi

## KUTIPAN

Jakarta (24/05) --- Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Mahfudz Abdurrahman menanggapi kerja cepat dari Jajaran Penegak hukum dalam menelisik dan mengungkap penyelewengan dalam penyelenggaraan Ekspor dan Impor Komoditi.

Menurut Mahfudz, penyelewengan komoditi tersebut termasuk kebutuhan pokok dan penting. Baik untuk kalangan rumah tangga dan juga kalangan industri.

"Kita baru saja dihebohkan dengan kelangkaan minyak goreng, yang mengakibatkan harga minyak goreng menjadi sangat mahal. Dan juga sebelumnya heboh masuknya baja impor kualitas rendah, yang menekan industri baja dalam negeri," ungkap Mahfudz.

Kedua hal tersebut, imbuhnya, menunjukkan ada yang salah dalam penegakan aturan dan pengawasan oleh lembaga terkait. Dan hal ini perlu kita perbaiki.

"Kita tentu prihatin dengan apa yang terjadi belakangan ini, bahkan kami di Komisi VI DPR RI sangat terkejut dengan apa yang terjadi pada proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat hukum kita, baik oleh Kepolisian dan Kejaksaan. Kerja aparat penegak hukum mengkonfirmasi kecurigaan, bahwa ada yang salah dalam penegakan aturan dan pengawasan. Dan sepertinya aparat penegak hukum masih terus bekerja, dibuktikan dengan munculnya pelaku baru yang di tersangkakan, kami sangat prihatin," ucap Anggota DPR RI Dapil Jabar VI ini.

Lebih lanjut Mahfudz

Abdurrahman menyatakan, pihaknya mendukung penuh upaya dan kerja keras aparat penegak hukum, agar semua terungkap jelas.

"Dan harus jadi efek jera di kemudian hari. Disamping tetap harus mengedepankan azas praduga tidak bersalah, karena memang belum ada yang diputuskan bersalah oleh lembaga peradilan. Kita jadikan peristiwa ini momentum untuk introspeksi dan juga perbaikan, dalam semua hal. Antara lain penegakan aturan, pengawasan, serta tata Kelola, karena aturan sudah tersedia tapi dalam pelaksanaan dan fungsi pengawasannya ternyata masih belum sesuai harapan," ujar Bendahara DPP PKS ini.

Peristiwa ini pun, lanjutnya, menjadi introspeksi bagi DPR RI, khususnya yang bermitra dengan Kementerian yang menangani sektor perdagangan. Agar lebih fokus lagi melakukan fungsi pengawasan sekaligus menyerap informasi dan dinamika di lapangan untuk diperdalam dengan jajaran terkait. Selengkapnyadi fraksi.pks.id



**H. MAHFUDZ ABDURRAHMAN, S.Sos**  
Anggota Komisi VI DPR RI

"Apresiasi yang tinggi kita berikan kepada jajaran penegak hukum, dengan ketegasan dan keterbukaannya, termasuk peran media pers yang terus memberitakan kepada masyarakat. Sehingga publik dapat mengetahui secara transparan. Dan yang paling penting, harus memberikan efek jera ke semua pihak. Baik dari jajaran pemerintah dan pengusaha. Jangan lagi coba-coba mencari keuntungan besar dengan melanggar peraturan dan merugikan orang banyak!,"



# RDP dengan PT. Bio Farma, Aleg PKS Minta **Fokus** **Serius** pada Pengembangan Obat Herbal

## KUTIPAN

Jakarta (25/05) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS asal Sumatera Barat, Nevi Zuairina, saat Rapat Dengar Pendapat dengan PT Bio Farma dan Anak Perusahaannya, meminta kepada perusahaan plat merah ini agar ada fokus pengembangan obat herbal.

Pasalnya, bahan baku herbal ini mudah ditemukan di dalam negeri sehingga akan menekan biaya yang sangat signifikan sehingga dapat menjangkau sebanyak-banyaknya masyarakat Indonesia.

Politisi PKS ini mengatakan, bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan obat tradisional dan herbal. Hal ini merupakan aset berharga yang harus dikembangkan. Sehingga, lanjut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, masyarakat Indonesia nantinya bisa tetap menjadikan obat tradisional dan herbal sebagai pilihan untuk

menjaga kesehatan dengan tetap sesuai standar.

"Apa saja usaha yang telah dilakukan Bio Farma untuk mengembangkan obat tradisional dan herbal ini? Sehingga masyarakat tetap menjadikan obat tradisional dan herbal untuk mengembangkan obat tradisional dan herbal ini, sehingga masyarakat tetap menjadikan obat tradisional dan herbal sesuai mutu dan kualitas yang tetap sesuai standar yang telah ditentukan menjadi salah satu pilihan dalam menjaga kesehatan," tanya Nevi.

Anggota Komisi VI DPR ini menguraikan bahwa, Indonesia merupakan negara yang banyak memiliki kekayaan obat tradisional dan herbal, yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

engan potensi yang sangat besar ini, Nevi menekankan kepada Biofarma dan seluruh bidang usaha di bawahnya lebih banyak memberikan porsi penelitian dan pengembangan obat tradisional herbal ini.

"Meski kita membutuhkan obat yang terjangkau, namun kualitas mesti menjadi point utama dalam memberikan alternatif. Masyarakat akan menjadikan obat tradisional dan herbal dengan mutu dan kualitas yang tetap sesuai standar yang telah ditentukan menjadi salah satu pilihan dalam menjaga kesehatannya", Tutup Nevi Zuairina.



**Hj. NEVI ZUAIRINA**  
Anggota Komisi VI DPR RI

"Meski kita membutuhkan obat yang terjangkau, namun kualitas mesti menjadi point utama dalam memberikan alternatif. Masyarakat akan menjadikan obat tradisional dan herbal dengan mutu dan kualitas yang tetap sesuai standar yang telah ditentukan menjadi salah satu pilihan dalam menjaga kesehatannya",



# Penunjukkan Luhut untuk Tangani Krisis Minyak Goreng, **Abaikan Good Government**

## KUTIPAN

Jakarta (25/05) --- Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak., menanggapi soal penunjukan Menko Maritim dan Investasi untuk menangani persoalan minyak goreng menunjukkan buruknya tata kelola pemerintahan Jokowi - Maruf Amin.

Menurut Amin, berdasarkan Tupoksinya, persoalan minyak goreng menjadi urusan Menko Perekonomian. Dari sudut pandang manapun, baik masalah hulu (CPO) maupun hilir (minyak goreng) itu menjadi domain Kemenko perekonomian.

"Apakah Jokowi tidak percaya dengan Airlangga Hartarto yang menjadi Menkonya, atau Airlangga Hartarto dianggap gagal? Ini menjadi tanda tanya besar di masyarakat", tegas Amin.

Disisi hilir, lanjut Amin, untuk industri minyak goreng menjadi tanggung jawab Kementerian Perindustrian, sedangkan urusan distribusi dan perdagangan minyak

goreng baik untuk pasar dalam negeri maupun ekspor menjadi domain Kementerian Perdagangan.

Sementara itu sisi hulu (produksi CPO) kementerian yang mengurus adalah Kementerian Pertanian. Ketiga kementerian tersebut berada dilingkup Kemenko Perekonomian bukan Kemenkomarves.

"Tata kelola pemerintahan menjadi keluar dari tupoksinya justru karena kebijakan presiden sendiri. Ini akan menjadi preseden buruk bagi tata kelola pemerintahan ke depan. Kesannya jadi sukasuka", ujar Amin.

Wakil Rakyat dari Dapil Jatim VI itu juga menilai,

penunjukan LBP, selain melanggar Tupoksi juga menyiratkan dua kemungkinan, yakni adanya kondisi kegawatan yang sudah tidak bisa ditangani secara biasa oleh pemerintah (khususnya dua menteri terkait), atau kemungkinan kedua, Jokowi menyerah dan tidak mampu menyelesaikan masalah ini.

"Bagaimana pun Presiden punya semua instrumen untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Baik instrumen hukum, ekonomi, maupun politik, mengapa instrumen yang ada tidak digunakan?", tanya Amin.

Amin juga menilai ada potensi konflik kepentingan atas penunjukan Menteri Luhut untuk penyelesaian masalah Minyak Goreng ini karena diduga adanya kedekatan LBP dengan pengusaha sawit besar.



**AMIN AK, M.M.**  
Anggota Komisi VI DPR RI

"Berdasarkan Tupoksinya, persoalan minyak goreng menjadi urusan Menko Perekonomian. Dari sudut pandang manapun, baik masalah hulu (CPO) maupun hilir (minyak goreng) itu menjadi domain Kemenko perekonomian. Apakah Jokowi tidak percaya dengan Airlangga Hartarto yang menjadi Menkonya, atau Airlangga Hartarto dianggap gagal? Ini menjadi tanda tanya besar di masyarakat"



# Terkait Beban Subsidi Energi, Politisi PKS: Presiden Jokowi Semestinya Jangan Mengeluh

## KUTIPAN

Jakarta (26/05) --- Presiden Jokowi blak-blakan mengatakan manuver pemerintah untuk menahan harga bahan bakar minyak (BBM) relatif berat dilakukan di tengah harga minyak mentah dunia yang masih tertahan tinggi hingga pertengahan tahun ini.

Sementara, sebagian besar negara sudah menyesuaikan harga BBM mereka mengikuti tren pasar dunia.

Menanggapi hal tersebut, Mulyanto yang Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS menilai, bahwa Presiden tidak seharusnya curhat dan mengeluh seperti itu. Karena tugas negara memang seperti itu.

Sesuai dengan amanat Pembukaan UUD tahun 1945, tujuan negara adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta menjamin kesehatan kesejahteraan umum.

"Negara hadir menjadi buffer shock atau shock breaker,

yakni bantalan bagi masyarakat dari turbulensi ekonomi global. Sehingga kejutan ekonomi yang menghantam dari luar dapat diredam agar tidak membuat masyarakat menjadi susah," ungkap Mulyanto.

Terkait lonjakan harga BBM, akibat Perang Rusia-Ukraina, menurut Mulyanto, seluruh negara-negara di dunia potensial menerima akibat turbulensi harga minyak global yang sama.

"Akan tetapi ada perbedaan substansial terhadap harga BBM di antara negara-negara tersebut. Secara umum bergantung pada daya beli masyarakat," pungkasnya.

Negara kaya, katanya, memiliki harga BBM yang lebih tinggi dibandingkan negara yang lebih miskin. Negara yang memproduksi dan mengeksport minyak, menjual minyak dengan harga rendah secara domestik.

Perbedaan harga minyak di masing-masing negara, tergantung pada variasi besaran pajak dan subsidi domestik untuk komoditas ini. Tergantung bagaimana sikap Pemerintah mereka terkait dengan kebijakan pajak dan subsidi.

"Ambil contoh negara serumpun seperti Brunei dan Malaysia menjual BBM dengan harga yang jauh lebih murah dibanding Indonesia. Harga bensin dengan RON 90 di Brunei sebesar Rp. 3.800,- per liter. Sementara harga bensin dengan RON 95 di Malaysia dijual sebesar Rp. 6.900 per liter. Di kita bensin Peralite (RON 90) dijual dengan harga Rp. 7.650,- per liter," jelas Mulyanto.

Fakta lain, lanjut Mulyanto, lonjakan harga migas dunia ternyata diikuti dengan kenaikan harga SDA yang menjadi andalan ekspor Indonesia seperti batubara, gas alam,



**Dr. H. MULYANTO, M.Eng**  
Anggota Komisi VII DPR RI

"Negara hadir menjadi buffer shock atau shock breaker, yakni bantalan bagi masyarakat dari turbulensi ekonomi global. Sehingga kejutan ekonomi yang menghantam dari luar dapat diredam agar tidak membuat masyarakat menjadi susah,"

CPO, tembaga, nikel, dll.

"Akibatnya, turbulensi ekonomi global ini malah membawa berkah bagi surplus perdagangan kita dan memperkuat penerimaan APBN kita," imbuhnya.

Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo saat acara Evaluasi Aksi Afiriasi Bangsa Buatan Indonesia, Jakarta, Selasa (24/5) mengatakan harga

BBM domestik seperti Peralite dan Pertamina yang masing-masing sebesar Rp7.650 dan Rp12.500 jauh lebih murah ketimbang negara lain. Misalnya, dia mencontohkan, harga BBM di Singapura sudah mencapai Rp32.000, Jerman di angka Rp31.000 dan Thailand sebesar Rp20.000.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

# Bersama Kementerian Perindustrian, Rofik Hananto **Kembangkan** 12 WUB IKM

## KUTIPAN

Purbalingga (18/05) --- Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Rofik Hananto menggandeng Kementerian Perindustrian menciptakan ratusan wirausahawan baru di Jawa Tengah khususnya di Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara dan Kebumen.

Kegiatan bertajuk Bimbingan Teknis dalam Rangka Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha Baru Industri Kecil Menengah di Jawa Tengah. Kegiatan diikuti 270 peserta dari 3 kabupaten dan dilaksanakan selama 4 hari.

Pembukaan kegiatan diadakan di Hotel Braling Purbalingga diikuti secara online peserta dari Banjarnegara dan Kebumen, Selasa (17/05/2022).

"Ini adalah langkah yang sangat bagus dari Kementerian Perindustrian untuk mengedukasi masyarakat, menyiapkan wirausahawan baru. Masyarakat harus dididik dan dilatih agar mempunyai skill dan knowledge yang memadai

sebagai wirausahawan baru," kata Rofik.

Anggota DPR RI Fraksi PKS itu menambahkan, kegiatan bimtek ini untuk mengolah keterampilan. Skill atau kemampuan dalam bisnis merupakan pintu untuk membuka peluang. Di sini akan diajari lifeskill untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Kalau pintu bisnis sudah dibuka, lanjut Rofik Hananto legislator asal Dapil Jawa Tengah 7 itu, maka yang bisa menjaganya adalah karakter. Pengusaha itu karakternya tahan banting. Lifeskill akan percuma kalau karakternya tidak bagus.

"Sedangkan skill dan knowledge adalah pembuka

sukses. Kemudian networking atau jejaring kerja. Nanti akan ada pendampingan. Di sini kita belajar membangun karakter yang bagus. Tidak cukup hanya modal yang banyak, lifeskill, tapi wirausahawan juga perlu karakter yang bagus," ujar Rofik.

Sementara Direktur Industri Kecil dan Menengah Pangan Furnitur dan Bahan Bangunan Kementerian Perindustrian Riefky Yuswandi mengatakan, pihaknya mendorong masyarakat bisa menjadi wirausahawan. Karena rasio wirausaha di Indonesia masih rendah, berkisar 3,5 persen.

"Padahal kita sedang menghadapi bonus demografi, yakni jumlah usia produktif sangat tinggi dan akan terus bertambah puncaknya diperkirakan tahun 2030. Sehingga kita harus mempersiapkan ini semua," katanya dalam kegiatan yang dibuka Bupati yang diwakili Asisten Administrasi Umum Sekda Budi Susetyono.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



## **H. ROFIK HANANTO, S.E**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Tengah VII

"Kami memberi wawasan terkait Manajerial, teknik produksi, bagaimana cara mengakses program-program pemerintah dan permodalan perbankan. Karena untuk mengaksesnya membutuhkan legalitas. Kami juga akan memfasilitasi aspek legalitas itu"





# Bahaya Wabah PMK Hewan Ternak, Aleg PKS Desak BRIN Segera Ambil Peran

## Selesaikan Riset

### KUTIPAN

Jakarta (25/05) --- Anggota Komisi VII DPR RI Rofik Hananto mendesak BRIN untuk secara aktif segera berperan dalam mengatasi penyakit mulut dan kuku (PMK) yang sudah menyerang jutaan ternak di 15 provinsi itu.

"Fraksi PKS meminta keterlibatan aktif BRIN dalam hal penanganan wabah penyakit PMK ini terutama dalam hal dukungan penelitian. BRIN sebagai support system dalam hal dukungan riset kepada lembaga negara yang lain harus membuktikan bahwa struktur BRIN yang sekarang lebih baik dari yang sebelumnya dalam hal mendukung sistem nasional iptek," katanya.

Dia menambahkan, dukungan penelitian yang dimaksud di sini adalah yang dapat memberikan hasil cepat (quick result) dalam memberi arahan dan kebijakan dalam penanganan wabah secara tepat. Bukan penelitian yang memerlukan waktu lama.

Berdasarkan laporan lapangan per 17 Mei 2022, penyakit mulut dan kuku (PMK) hingga saat ini sudah tersebar di 15 provinsi di Indonesia, hal ini disampaikan oleh Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo.

Dari 15 provinsi terdeteksi di 52 kabupaten/ kota. Populasi ternak di 15 provinsi tersebut tercatat 13,8 juta ekor. Namun, dari jumlah populasi itu, yang benar-benar terdampak ditemukan kasus PMK pada populasi 3,9 juta ternak.

Lalu yang benar-benar sudah dinyatakan positif kena PMK ada sekitar 13 ribuan ternak. Di tengah suasana perayaan Idul Adha yang semakin dekat, adanya wabah

ini tentu saja akan memukul peternak yang mengharapkan akan memanen dan menikmati hasil hewan ternaknya.

Untuk itu, lanjut Rofik, Pemerintah harus gerak cepat dalam penanganan wabah ini. Keterlibatan lembaga riset seperti BRIN diharapkan juga dapat membantu dalam penanganannya.

"Fraksi PKS meminta BRIN cepat dan tanggap dalam memberikan hasil penelitian seperti ini yang diperlukan dalam penanganan wabah dan berkomunikasi secara aktif dengan pemangku kepentingan terkait seperti Kementerian, Dinas Peternakan, Rumah Potong, serta Para Peternak sendiri, terutama di daerah yang terkena wabah. Jangan sampai birokrasi yang tidak perlu menghalangi komunikasi dan koordinasi," tegas Legislator asal Dapil Jawa Tengah VII itu  
Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



### H. ROFIK HANANTO, S.E

Anggota Komisi VII DPR RI

Riset tidak boleh ditujukan hanya untuk riset saja. Lembaga riset seperti BRIN tidak boleh hanya menjadi 'Menara Gading', yang dipandang indah tetapi manfaatnya kurang terasa bagi masyarakat. Jangan sampai asset dan SDM Pusat Veteriner yang diambil alih dari Kementan ini malah tidak bisa berkontribusi secara maksimal dalam penanganan wabah ini,"

# PROGRAM UNGGULAN

## FRAKSI PKS DPR RI



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
*Kecatif Atakrif Substantif*



Mengenalkan tokoh pahlawan bangsa dan perjuangannya kepada generasi bangsa agar dapat meneladani mereka dan tidak ada mata rantai sejarah yang putus.

# Pantau Kesiapan Haji 2022, Aleg PKS Minta Kemenag Sumut **Lebih Fokus** Siapkan Keberangkatan

## KUTIPAN

Medan (25/05) — Anggota komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS Iskan Qolba Lubis, meminta kepada Kementerian Agama Republik Indonesia Sumatera Utara dalam mengawasi pelaksanaan ibadah haji tahun ini.

"Sebanyak 3.777 orang masyarakat Sumatera Utara telah dipastikan oleh Kementerian Agama Sumatera Utara akan berangkat ibadah Haji Tahun 1443H/2022 ini. Kementerian Agama Sumatera Utara saya minta disini agar lebih mempersiapkan kesiapan perihal keberangkatan haji tahun ini dengan baik serta jangan sampai ada kekurangan yang akan menghambat keberangkatan haji khusus nya masyarakat di dapil saya Sumatera utara. Kuota bagi jamaah haji wilayah Sumatera Utara ini yang saya harap bisa kian terus bertambah seiring membaiknya kasus Covid-19 di negara kita ini, sehingga masyarakat di wilayah Sumatera

Utara akan lebih cepat untuk berangkat haji di tahun-tahun yang akan datang", Ujar Iskan.

Anggota Legislative asal Sibuhuan ini juga menambahkan agar Kementerian Agama Sumatera Utara dapat memastikan kesiapan terkait akomodasi untuk keberangkatan jamaah Haji masyarakat Sumatera utara tahun ini.

"Untuk kesiapan akomodasi seperti hotel penginapan bagi masyarakat Sumatera Utara disana harus perlu disiapkan kementerian agama wilayah Sumatera utara agar tidak ada kekurangan sesampainya disana. Begitu juga dengan makanan serta pesawat yang perlu di control juga agar persiapan-persiapan

yang akan di lakukan dalam waktu dekat ini," ujarnya.

Jemaah haji, imbuhnya, akan menerima uang saku sebanyak 1500 Rial Saudi di asrama haji sebelum berangkat. Dan tahun ini jemaah haji dapat akomodasi makan 3 kali sehari yang dulunya hanya dua kali untuk memudahkan jemaah haji fokus ibadah.

"Oleh karenanya sebelum keberangkatan haji ini semua dapat terealisasikan dengan sempurna sehingga kerja kita semua dapat membuahkan hasil yang baik khususnya bagi masyarakat di Sumatera Utara dalam keberangkatan Haji tahun ini", Tegas Iskan.

Lebih lanjut, Iskan juga menambahkan dalam mengawasi keberangkatan haji tahun ini kementerian agama Sumatera utara harus sigap dan cepat apabila terjadi masalah pada warga Sumatera utara dalam pelaksanaan ibadah haji tahun ini.

"Untuk keberangkatan haji tahun ini Pemerintah khususnya Kementerian Agama wilayah Sumatera utara harus sigap dan cepat dalam menangani



## H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.

Dapil Sumatera Utara II

**"Untuk kesiapan akomodasi seperti hotel penginapan bagi masyarakat Sumatera Utara disana harus perlu disiapkan kementerian agama wilayah Sumatera utara agar tidak ada kekurangan sesampainya disana"**

masalah jika masyarakat kita ada kendala di Arab Saudi nanti, bukan tidak mungkin kendala yang tidak dapat kita prediksi ini dapat saja terjadi maka dari itu saya minta

kementerian agama Sumatera utara harus selalu memantau dan mengawasi masyarakat Sumatera Utara dalam pelaksanaan ibadah haji tahun ini", pungkas Iskan mengakhiri.



# Kuota Haji Indonesia Dibatasi, Nur Azizah Bersama Komisi 8 Lakukan Negosiasi

## KUTIPAN

Depok – Anggota Komisi VIII DPR RI, Hj. Nur Azizah Tamhid, B.A.,M.A, bersama Anggota Komisi VIII DPR RI lakukan negosiasi terkait pembatasan kuota bagi Jemaah Haji Indonesia. Nur Azizah sebagai Anggota Komisi VIII yang bermitra dengan Kementerian Agama Republik Indonesia, bersama para Anggota Komisi VIII DPR RI, mendesak Kemenag RI lakukan negosiasi bersama Kerajaan Arab Saudi. Sehingga tahun ini Indonesia dapat memberangkatkan Jemaah Haji.

Nur Azizah menyampaikan kabar gembira, setelah dua tahun ibadah haji untuk Indonesia ditutup, tahun ini meski masih berstatus pandemi Covid-19 namun para jemaah haji Indonesia dapat menjadi tamu Allah SWT.

Kabar gembira tersebut Nur Azizah sampaikan dalam Forum Group Discussion (FGD) Strategi Pengelolaan Keuangan

Haji dan Sosialisasi BPIH 1443 H di Hotel Savero, Jalan Margonda Raya, Beji, Kota Depok, Jumat (13/5/2022).

“Alhamdulillah, Pemerintah Arab Saudi sudah memperbolehkan ibadah haji meski dibatasi, untuk Indonesia sendiri jemaahnya hanya diperbolehkan 48 persen dari total kuota yang dimiliki, artinya sekitar 100.000-an jemaah saja

dari total 221.000 lebih kuota yang kita miliki,” jelas Nur Azizah dihadapan para peserta FGD.

Nur Azizah menambahkan, nantinya yang diberangkatkan adalah jemaah haji yang gagal berangkat pada tahun 2020 namun tetap menyesuaikan kuota yang ada, jadi tidak semua bisa berangkat. Selain pembatasan kuota, Pemerintah Arab Saudi juga membatasi usia para jemaah haji, harus dibawah 65 tahun.

“Pembatasan usia ini berasal dari Pemerintah Arab Saudi, namun Komisi 8 beserta Pemerintah Indonesia sedang mencoba melakukan negosiasi kepada Pemerintah Arab Saudi supaya calon jemaah hari yang berusia 65 tahun dan dalam kondisi sehat dapat berangkat,” ujar Nur Azizah.

Dirinya menuturkan, hal ini didasari oleh fakta dilapangan bahwa terdapat usia dibawah 65 tahun namun kondisi kesehatannya tidak memungkinkan untuk berangkat.



**Hj. NUR AZIZAH TAMHID, B.A.,M.A.**  
Anggota Komisi VIII DPR RI

“Alhamdulillah, Pemerintah Arab Saudi sudah memperbolehkan ibadah haji meski dibatasi, untuk Indonesia sendiri jemaahnya hanya diperbolehkan 48 persen dari total kuota yang dimiliki, artinya sekitar 100.000-an jemaah saja dari total 221.000 lebih kuota yang kita miliki,”



# Politisi PKS Minta Pemerintah **Pertahankan** Bansos bagi Anak Yatim Piatu di APBN 2023

## KUTIPAN

Jakarta (30/05) --- Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf membeberkan sejumlah usulan Fraksi PKS melalui pandangan resminya merespons penyampaian pemerintah soal arah kebijakan fiskal Tahun Anggaran (TA) 2023.

Usulan tersebut disampaikan juga berdasarkan pertimbangan akan berakhirnya masa berlaku UU No. 2 Tahun 2020 atau UU Covid-19 dan isu prioritas di Komisi VIII yang membidangi urusan agama, sosial, kebencanaan, dan perlindungan anak.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya nomor 37/PUU-XVIII/2020 menyatakan masa berlaku UU No. 2 Tahun 2020 atau UU Covid-19 dibatasi paling lama hingga akhir tahun kedua sejak UU Covid-19 diundangkan.

"Dengan pertimbangan bahwa APBN 2023 dirancang untuk kembali menuju pada defisit di bawah 3 persen, ditambah munculnya risiko baru berupa konflik Ukraina-Rusia

dan ketegangan geopolitik yang menyebabkan melonjaknya harga sejumlah komoditas sehingga diprediksi akan berdampak pada ketahanan sosial-ekonomi masyarakat miskin dan rentan, maka kami menyampaikan beberapa usulan Fraksi PKS dengan tujuan untuk memastikan APBN 2023 betul-betul memihak pada kepentingan rakyat," ucap Bukhori di Jakarta, Kamis (26/5/2022).

Pertama, Fraksi PKS mendukung pemerintah melanjutkan belanja bantuan sosial untuk membantu daya beli masyarakat miskin dan rentan agar dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

"Selain melalui bantuan yang berbentuk tunai, usaha

menjaga keberlanjutan ketahanan sosial-ekonomi masyarakat juga perlu dilakukan melalui bantuan sosial yang berbasis pemberdayaan semisal program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) dan Kewirausahaan Sosial bagi penerima manfaat yang potensial. Bantuan sosial ini dinilai berhasil mendorong graduasi penerima manfaat dari jurang kemiskinan sehingga layak ditambah anggarannya," terangnya.

Selain itu, lanjutnya, pemerintah juga perlu memperbaiki besaran manfaat bantuan sosial agar dampaknya terasa signifikan bagi penerima manfaat sehingga dapat memperbaiki tingkat kesejahteraan dan kualitas SDM penerima manfaat di tengah kenaikan harga sejumlah komoditas.

"Bantuan sosial seperti PKH, Kartu Sembako, RS-RTLH, dan Kewirausahaan Sosial yang merupakan program unggulan dari Kementerian Sosial mesti ditingkatkan dari segi kualitas, kuantitas, dan dipastikan terintegrasi," lanjutnya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



**KH. BUKHORI, Lc., M.A.**

Anggota Komisi VIII DPR RI

"Fraksi PKS meminta pemerintah memastikan mandatory spending anggaran pendidikan yang sebesar 20 persen dari APBN mendapatkan alokasi yang memadai dan dirasakan manfaatnya secara adil oleh satuan pendidikan yang berada di bawah naungan Kemendikbud Ristek maupun Kementerian Agama. "



# HNW Minta Kemenag Tindak Tegas Pemotong Bantuan Pesantren

## KUTIPAN

Jakarta (30/05) --- Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid meminta Kementerian Agama menindak tegas para pihak yang memotong bantuan Pesantren sesuai dengan rekomendasi laporan terbaru dari Indonesia Corruption Watch (18/4/2022).

HNW sapaan akrabnya juga mendorong ICW untuk melaporkan temuan mereka kepada aparat penegak hukum sehingga bisa cepat ditindaklanjuti.

"Saya menyalurkan bila benar ada potongan bantuan Pesantren oleh para oknum di berbagai daerah. Kemenag harus serius melakukan reformasi birokrasi dan pendataan madrasah dan pesantren sehingga tidak lagi terjadi penyimpangan dalam penyaluran bantuan, serta menindak tegas oknum internal yang terbukti memotong bansos," disampaikan Hidayat dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (29/05/2022).

Wakil Ketua Majelis Syura PKS ini menjelaskan, madrasah

dan Pesantren memang mendapatkan bantuan di tengah pandemi Covid-19 dengan total anggaran sebesar Rp 2,599 Triliun. Bantuan tersebut didistribusikan pada periode Semester II 2020 hingga Semester I 2021.

Badan Pemeriksa Keuangan dalam IHPS Semester I 2021 juga telah menemukan permasalahan tersebut, di mana ditemukan penyaluran BOP lebih dari satu kali baik pada Pesantren maupun Madrasah setidaknya pada 1.072 lembaga. Kondisi itu menyebabkan potensi kerugian negara sebesar Rp 62,2 Miliar.

"Karena sudah jadi temuan BPK sejak tahun 2021, maka seharusnya Kemenag

sudah melakukan langkah-langkah perbaikan dan koreksi yang memadai. Munculnya laporan terbaru dari ICW menjadi momentum bagi Kemenag untuk semakin menyempurnakan koreksi tersebut dan menjelaskannya kepada publik. Jangan sampai nama baik Pesantren justru tercemar karena komunikasi atau bahkan perbaikan tersebut tidak dilaksanakan," ujarnya.

HNW menilai, koreksi ICW atas bansos Pesantren menjadi perhatian publik atas pentingnya bantuan tersebut. Sayangnya, semenjak semester II 2021 tidak ada lagi bantuan Pesantren, padahal dampak dari Covid-19 masih terjadi di banyak Pesantren dan Madrasah.

"Oleh karena itu kami sejak awal mendorong agar bantuan Pesantren dan Madrasah tetap dilanjutkan, bukan justru dipangkas dan dipotong oleh oknum apalagi sampai dihapuskan oleh Pemerintah. Adapun temuan BPK dan masyarakat agar menjadi perbaikan bagi Kemenag untuk lebih amanah dalam penyaluran bantuan," pungkasnya.



**Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A**  
Anggota Komisi VIII DPR RI

"Karena sudah jadi temuan BPK sejak tahun 2021, maka seharusnya Kemenag sudah melakukan langkah-langkah perbaikan dan koreksi yang memadai. Munculnya laporan terbaru dari ICW menjadi momentum bagi Kemenag untuk semakin menyempurnakan koreksi tersebut dan menjelaskannya kepada publik. Jangan sampai nama baik Pesantren justru tercemar karena komunikasi atau bahkan perbaikan tersebut tidak dilaksanakan"

# Ratusan Miliar Dana Kartu Prakerja Tak Tepat Sasaran, Aleg PKS Sebut Evaluasi Program Gagal

## KUTIPAN

Jakarta (26/05) --- Anggota Komisi IX DPR RI F-PKS Dr. Kurniasih Mufidayati menyebutkan temuan BPK yang melaporkan temuan dana Rp 289,5 miliar program kartu prakerja menunjukkan jika pelaksana gagal melakukan evaluasi saat program pelatihan kartu prakerja dihentikan sementara tahun 2020 silam.

Selain itu, temuan BPK semakin menguatkan rekomendasi KPK yang sempat meminta agar program kartu prakerja dihentikan. Bagi Kurniasih, proses evaluasi yang dijanjikan pemerintah terhadap program ini ternyata tidak menemukan hasilnya.

"Dulu program pelatihan dihentikan alasannya untuk evaluasi, lalu ada rekomendasi KPK agar program ini dihentikan jawaban dari pemerintah sama akan melakukan evaluasi.

Berjalan hingga kini tervalidasi jika proses perbaikan terhadap program ini tidak berjalan," ungkap Kurniasih dalam keterangannya, Kamis (26/5/2022).

Anggota DPR RI Dapil Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan Luar Negeri ini mengingatkan agar catatan-catatan dari lembaga penegak hukum dan auditor pemerintah tidak dianggap angin lalu.

Sebab bagi program yang dianggarkan hingga Rp 20 Triliun ini, adanya dana yang tidak tepat sasaran hingga ratusan miliar mengindikasikan jika pengelolaan program ini carut marut.

"BPK bisa menindaklanjuti temuan ini dengan melibatkan penegak hukum apakah ada unsur kerugian negara di dalamnya? Sebab ini tidak

main-main, kita sedang menggunakan anggaran negara dalam kondisi sulit. Hati-hati menggunakan anggaran sementara rakyat terus ditarik berbagai iuran, kenaikan pajak hingga kenaikan harga bahan pokok," papar Kurniasih.

Kurniasih mengatakan pihaknya sejak lama meminta program kartu prakerja dihentikan total kemudian dilakukan evaluasi menyeluruh. Program yang baik tanpa pelaksanaan yang baik dampaknya hanya akan menghamburkan anggaran.

"Persoalan kartu prakerja ini tak pernah selesai mulai dari platform pelatihan yang menimbulkan conflict of interest dengan perusahaan staf ahli presiden waktu itu, temuan KPK, banyaknya joki kartu prakerja, pengawasan yang tidak maksimal karena program ini di bawah Menko Perekonomian yang secara pengawasan di DPR tidak spesifik dan kini muncul temuan anggaran tidak tepat sasaran yang melibatkan dana sangat besar," ujar Kurniasih.



**Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.**  
Anggota Komisi IX DPR RI

“Persoalan kartu prakerja ini tak pernah selesai mulai dari platform pelatihan yang menimbulkan conflict of interest dengan perusahaan staf ahli presiden waktu itu, temuan KPK, banyaknya joki kartu prakerja, pengawasan yang tidak maksimal karena program ini di bawah Menko Perekonomian yang secara pengawasan di DPR tidak spesifik dan kini muncul temuan anggaran tidak tepat sasaran yang melibatkan dana sangat besar”



# Aleg PKS Apresiasi Kebijakan Presiden Jokowi Bolehkan Lepas Masker di Ruang Terbuka

## KUTIPAN

Alifudin menyebutkan bahwa sosialisasinya harus secara gencar seperti awal pandemi covid 19 menerapkan protokol kesehatan, supaya kebijakan pemerintah tersebut tidak miss information.

Jakarta (18/05) — Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Alifudin, mengapresiasi kebijakan Pemerintah atas kelonggaran pemakaian masker di ruang publik, namun hal tersebut harus diiringi dengan target capaian vaksinasi yang terukur.

"Kami apresiasi atas kebijakan pemerintah bahwa di ruang terbuka diperbolehkan lepas masker, tapi kami minta tolong pemerintah harus menginformasikan atau mengkampanyekan hal ini secara masif" Ucap Alifudin saat diwawancarai, Rabu (18/05/2022).

Alifudin juga menambahkan bahwa sosialisasinya harus secara

gencar seperti awal pandemi covid 19 menerapkan protokol kesehatan, supaya kebijakan pemerintah tersebut tidak miss information.

"Yang kedua, soal vaksinasi yang harus digencarkan, agar warga sudah vaksinasi lengkap dan aparatur penegak harus tegas serta melakukan pendekatan persuasif" tutur Alifudin.

Persoalan data juga harus di analisa dengan tepat, agar membuat status endemi ini bisa tepat.

"Covid 19 ini melalui udara kan jadi harus juga berhati hati, dan kita harus tetap melakukan serta menjaga kebiasaan hidup sehat dan bersih, seperti cuci tangan pakai sabun, dan

kebiasaan gerakan hidup bersih" tegas Alifudin.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mencabut kebijakan wajib masker kepada seluruh masyarakat di Indonesia. Jokowi mengatakan kebijakan ini diberlakukan karena kasus Covid-19 di Indonesia semakin terkendali.

"Dengan memperhatikan kondisi saat ini, di mana penanganan Covid di Indonesia yang semakin terkendali, maka perlu saya sampaikan bahwa pemerintah memutuskan melonggarkan kebijakan pemakaian masker," kata Jokowi saat jumpa pers daring, Selasa (17/5/2022).



**H. ALIFUDIN, S.E., M.M**

Anggota Komisi IX DPR RI

"Kami apresiasi atas kebijakan pemerintah bahwa di ruang terbuka diperbolehkan lepas masker, tapi kami minta tolong pemerintah harus menginformasikan atau mengkampanyekan hal ini secara masif"



# BPK Temukan Kejanggalan Proses Vaksinasi, Aleg PKS: **Selidiki** dan Jangan Maklumi Begitu Saja

## KUTIPAN

"Temuan BPK ini harus segera diselidiki lebih lanjut, jangan anggap enteng dan seperti angin lalu. Jika vaksin yang beredar tanpa melalui izin, bagaimana kita bisa memastikan kualitasnya?" kata Netty dalam keterangan media, Sabtu (28/05).

Jakarta (28/05) — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) membeberkan temuan terkait sejumlah kejanggalan dalam proses pengadaan dan vaksinasi Covid-19 di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani, meminta pemerintah untuk menindaklanjuti temuan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.

"Temuan BPK ini harus segera diselidiki lebih lanjut, jangan anggap enteng dan seperti angin lalu. Jika vaksin

yang beredar tanpa melalui izin, bagaimana kita bisa memastikan kualitasnya?" kata Netty dalam keterangan media, Sabtu (28/05).

Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat bahwa sebanyak 297 bets atau 78.361.500 dosis vaksin Covid-19 beredar tanpa melalui penerbitan izin bets atau lot release.

"Dalam laporannya, BPK juga mengatakan sarana dan prasarana vaksin belum sepenuhnya menggunakan dasar perhitungan yang sesuai dengan kondisi terkini serta minimnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Ini adalah persoalan serius yang akan berdampak pada kesiapan kita sebagai bangsa dalam pengendalian pandemi Covid-19," kata Netty.

"Ketidackermatan distribusi vaksin ini tidak boleh dimaklumi begitu saja tanpa ada proses evaluasi dan investigasi. Jangan sampai hanya karena alasan kedaruratan, semua rambu dan norma dalam menjalankan kebijakan yang bagus ditabrak begitu saja" tambah Netty.

Selain menjadi salah satu cara melindungi masyarakat dari pandemi, vaksin yang pengadaannya menggunakan anggaran yang besar tentu harus dilakukan penyelidikan secara menyeluruh.

"Jangan biarkan pelanggaran dianggap biasa dan menguap begitu saja" ungkapnya.



**Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si**

Anggota Komisi IX DPR RI

Ketidackermatan distribusi vaksin ini tidak boleh dimaklumi begitu saja tanpa ada proses evaluasi dan investigasi. Jangan sampai hanya karena alasan kedaruratan, semua rambu dan norma dalam menjalankan kebijakan yang bagus ditabrak begitu saja"

# Aleg Komisi X FPKS Ingatkan Hal-hal yang Perlu Ada Dalam RUU Sisdiknas

## KUTIPAN

Jakarta (18/05) --- Memasuki masa sidang kelima yang baru dibuka pada Selasa (18/05) kemarin, Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa Amaliah segera tancap gas mengingatkan Pemerintah untuk secara serius, detil namun hati-hati dalam menggodok Rancangan Undang-Undang Sisdiknas yang merupakan revisi atas UU No 20 Tahun 2013 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

"Yang kami dengar Pemerintah berharap RUU ini diharapkan bisa masuk dalam prioritas RUU tahun depan, sehingga pemerintah sudah mulai mengambil langkah persiapan draf naskah Undang-Undang-nya. Meski tenggat waktu untuk mendorong RUU ini masuk prioritas tahun depan sangat pendek tetapi setidaknya naskah RUU ini harus dipastikan dibuat dengan sangat serius, detil, namun berhati-hati, dengan menjadikan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pondasi utama," tegas Ledia.

Penegasan aleg Fraksi PKS ini bukan tanpa alasan. Dalam beberapa bulan terakhir publik dikejutkan dengan keriuhan terkait adanya 'bocoran' draft naskah RUU Sisdiknas yang memunculkan beragam kritisi.

"Pemerintah lewat berbagai pernyataan para pemangku jabatan di Kemendikbudristek maupun lewat rilis di laman resmi website kementerian memang mengaku telah melakukan beberapa kali uji publik terbatas untuk mengkaji draft naskah RUU awalan," pungkasnya.

Sayangnya draft awalan ini, imbuhnya, ternyata memunculkan beberapa isu sensitif. Seperti hilangnya frasa madrasah dari batang tubuh, keikutsertaan masyarakat membiayai pendidikan, perubahan standar pendidikan, munculnya lembaga mandiri yang bisa ikut memberi penilaian pada siswa dan banyak lagi.

"Pihak DPR sendiri menyatakan belum menerima draft resmi. Uji publik baru dilakukan sangat terbatas namun itu saja sudah ramai memunculkan kontroversi. Tambahan pula Kementerian sendiri memang nampak tidak secara transparan dan terbuka menyampaikan draft awal yang diujipublikasikan ini hingga segala macam kritisi pun bermunculan lewat bocoran draft naskah," jelas Sekretaris Fraksi PKS DPR RI ini.

Untuk itu Ledia sekali lagi mengingatkan meminta Kemendikbudristek untuk sangat serius, detil namun berhati-hati dalam menyiapkan naskah RUU Sisdiknas ini.

"Jangan tergesa-gesa hingga abai pada hal-hal mendasar yang harus menjadi



**Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T**  
Anggota Komisi X DPR RI

**"Jangan tergesa-gesa hingga abai pada hal-hal mendasar yang harus menjadi pertimbangan dalam membuat Undang-Undang yang menyangkut masa depan pendidikan di negeri ini."**

pertimbangan dalam membuat Undang-Undang yang menyangkut masa depan pendidikan di negeri ini. Pertimbangan dasar secara Filosofis, Yuridis dan Sosiologisnya harus jelas, begitu pula kajian naskah

akademiknya harus kuat, mendalam dan tentu saja sedapat mungkin harus \_up to date\_, disesuaikan dengan perkembangan jaman."

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



# Anggota FPKS: Kemiskinan dan Pengangguran Belum Turun, Pemerintah Harus Bekerja Agresif

## KUTIPAN

Jakarta (24/05) --- Anggota DPR RI Fahmi Alaydroes mengatakan bahwa pemerintah harus lebih agresif menurunkan angka kemiskinan yang meningkat selama masa pandemi.

"Angka kemiskinan belum kembali ke periode sebelum pandemi sebanyak 24,79 juta jiwa (September 2019). Dimana Jumlah penduduk miskin sampai September 2021 tercatat sebesar 26,5 juta jiwa. Artinya masih ada 1,71 juta jiwa yang miskin terdampak pandemi masih terjebak dalam lubang kemiskinan," ujarnya dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (24/05).

Menurut Legislator PKS ini angka pengangguran juga sangat tinggi, ia mendorong pemerintah agar menurunkan angka tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada tahun 2023 dengan berbagai upaya yang lebih serius.

"Angka penganggur masih

tercatat sebanyak 8,40 juta orang per Februari 2022. Dua tahun lalu terdapat 6,88 juta orang menganggur. Perlu dicatat, tingkat pengangguran Indonesia masih belum kembali kepada posisi sebelum pandemi Covid-19," katanya.

Anggota DPR RI asal Dapil Kabupaten Bogor ini mengingatkan pemerintah bahwa tingkat pengangguran usia muda di Indonesia adalah yang tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Pengangguran berusia muda di Indonesia pada kisaran 18 persen.

Sementara negara lain seperti Thailand (8%), Vietnam (8,87%), begitupun Brunei, Philipina, Singapura, dan Malaysia masih berada di bawah 15 persen.

"Bonus demografi Indonesia akan terancam, jika kesempatan lapangan kerja untuk generasi muda kian sulit dicari," katanya.

Fahmi juga mendorong Pemerintah untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia agar lebih kompetitif dengan SDM negara lainnya. Dalam Global Talent Competitiveness Index (GTCI) 2021 yang diterbitkan INSEAD di Fontainebleau, Prancis menunjukkan bahwa daya saing Indonesia menurun, tahun 2019 Indonesia berada pada peringkat 67 dan menjadi peringkat 70 dari 134 negara pada tahun 2021.

"Indonesia tertinggal dibandingkan negara tetangga seperti Singapura, yang berada pada peringkat kedua dalam indeks daya saing global. Selain itu, dua negara jiran kita juga berada pada peringkat daya saing yang lebih unggul. Malaysia berada pada peringkat 26, Brunei Darussalam ranking 47, Thailand 68, sementara Philipina berada pada peringkat 55," ujarnya.



**Dr. H. FAHMY ALAYDROES, MM, M.Ed.**

Anggota Komisi X DPR RI

"Di kawasan Asia Tenggara. Pengangguran berusia muda di Indonesia pada kisaran 18 persen. Sementara negara lain seperti Thailand (8%), Vietnam (8,87%), begitupun Brunei, Philipina, Singapura, dan Malaysia masih berada di bawah 15 persen. Bonus demografi Indonesia akan terancam, jika kesempatan lapangan kerja untuk generasi muda kian sulit dicari

# Wakil Ketua FPKS: Pemerintah **Gagal** Jelaskan Persoalan Fiskal Paling Mendasar

## KUTIPAN

Jakarta (23/05) --- Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Ecky Awal Mucharam, menyoroti bagaimana pemerintah tidak mampu melihat akar permasalahan yang mendasar di fiskal.

Terkait hal ini, kata Ecky, dua poin penting yang tidak mampu dijelaskan oleh Pemerintah yakni terkait bagaimana mengupayakan peningkatan pendapatan dan tentang persoalan belanja yang paling fundamental.

"Pertama adalah terkait dengan konteks budgeting. Hal yang paling krusial dan paling mendasar adalah bagaimana pendapatan menjadi konsideran paling penting dalam merumuskan prioritas fiskal. Pemerintah harus mampu menjelaskan faktor apa saja yang dapat mendorong penerimaan negara ke depan. Apakah motor penggerakannya dari harga komoditas melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak? Atau apakah dari

kenaikan pajak seperti PPN? Ataukah ada faktor-faktor lainnya?" jelasnya.

Berdasarkan konteks ini, Ecky menyoroti proyeksi penerimaan pajak yang naik 15 persen dan PNPB yang naik 5 persen, namun tidak dijelaskan secara rinci langkah apa saja yang mendorong realisasi tersebut. Hal ini menjadi krusial agar tidak terjadi shortfall penerimaan nantinya.

"Setelah upaya-upaya penerimaan tergambar dengan jelas, baru kemudian bagaimana rencana prioritas belanjanya," tambahnya.

Secara prinsip, Ecky setuju dengan bagaimana fiskal mesti diarahkan agar dapat menjadi bantalan sosial. Misalnya bagaimana fiskal digunakan

untuk menyelematkan PLN dan Pertamina agar harga-harga yang diatur (administered price) seperti harga listrik, dan minyak dapat dikendalikan. Namun demikian, dibalik itu, pemerintah juga perlu melihat persoalan belanja hingga ke faktor fundamentalnya.

"Nah, persoalannya penjelasan tentang justifikasi kebutuhan-kebutuhan belanja tidak mampu menjawab persoalan fundamental yang ada. Misalnya terkait upaya menyelematkan PLN agar tidak rugi karena menanggung beban pengendalian harga listrik. Padahal, persoalan fundamentalnya ada pada setting kebijakan yang menjadikan PLN harus menanggung itu semua," contohnya.

"Salah satunya adalah ambisi proyek 35.000 MW. Dengan ambisinya, pemerintah membuka investasi besar-besaran agar memenuhi target tersebut. Semua regulasi dan kebijakan dilonggarkan termasuk klausul-klausul kontrak yang sebenarnya merugikan PLN dan negara. Seperti skema take or pay. Di tengah kenaikan harga bahan baku dan kondisi kelebihan



## H. ECKY AWAL MUCHARAM

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI

"Pemerintah harus mampu menjelaskan faktor apa saja yang dapat mendorong penerimaan negara ke depan. Apakah motor penggerakannya dari harga komoditas melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak? Atau apakah dari kenaikan pajak seperti PPN? Ataukah ada faktor-faktor lainnya?"

pasokan listrik, PLN mau tidak mau harus membeli listrik dari pembangkit swasta dengan harga yang tinggi. Dampaknya apa? PLN rugi, fiskal harus nombokin, kalau anggaran

terbatas masyarakat harus menanggung beban" jelasnya lebih detail.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Terkait Bank BUMN Danai Industri  
Batu Bara Tanpa Agunan,

## Aleg PKS: Bertentangan dengan Prinsip Collateral

### KUTIPAN

Jakarta (29/05) --- Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) menyesalkan beredarnya kabar pencairan dana triliunan rupiah yang diberikan perbankan untuk industri batu bara tanpa agunan atau agunannya tidak sepadan dengan pinjaman. Jumlah pendanaan yang besar (mencapai Rp 89 triliun) ini diduga turut didanai oleh Bank BUMN.

Menanggapi kabar ini, Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, menyampaikan pandangannya di Jakarta, Sabtu (28/05/2022).

"Menurut saya, bank sebagai pemberi pinjaman tetap harus mengukur kelayakan kredit calon debitur dengan prinsip 6 C, yakni Character, Capacity/Cashflow, Capital, Conditions, Collateral dan Constraint. Apabila isu ini benar, tentu bertentangan dengan harus adanya prinsip Collateral (agunan)," kata Anis.

Menurutnya, agunan ini sangat penting sebagai second way-out jika debitur melakukan wanprestasi dan secara

psikologis menjadi pengikat keseriusan debitur menjalankan usaha dan membayar kewajibannya. Apabila perbankan memberikan pinjaman 'dengan' atau 'tanpa' agunan, maka hal ini harus diatur dengan jelas dalam aturan internal bank.

Terkait kekhawatiran sebagian pihak akan potensi terjadinya penyalahgunaan wewenang dan kredit macet, Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini menekankan bahwa apabila terjadi penyalahgunaan wewenang atau aturan, maka hal ini bisa dikenakan beberapa pasal baik aturan Perbankan, OJK maupun aturan lainnya. Belum lagi apabila

kemudian menjadi kredit macet yang merugikan keuangan negara karena kabar ini terkait dengan salah satu BUMN, maka sudah tersedia perangkat hukum yang akan digunakan untuk menyelesaikannya.

Adapun terkait dengan dampak lingkungan, Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini mendorong agar perbankan di tanah air turut mendukung energi baru terbarukan.

"Terkait semangat energi baru terbarukan, saya sendiri termasuk yang mendukung semangat penggunaan sumber daya terbarukan karena seharusnya potensi ini bisa dimanfaatkan sepanjang masa melihat jumlahnya yang melimpah," ujar Anis.

Tetapi hal ini harus mendapatkan perhatian serius, terkait dengan masalah lingkungan, sehingga semangat energi baru terbarukan juga harus melihat dampak jangka panjangnya.

"Untuk itu, harus tetap selektif supaya tidak bertabrakan dengan kebijakan pemerintah terkait lingkungan hidup dan hal lainnya," pungkas Anis.



**Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag.,M.Si**

Anggota Komisi XI DPR RI

"Menurut saya, bank sebagai pemberi pinjaman tetap harus mengukur kelayakan kredit calon debitur dengan prinsip 6 C, yakni Character, Capacity/Cashflow, Capital, Conditions, Collateral dan Constraint. Apabila isu ini benar, tentu bertentangan dengan harus adanya prinsip Collateral (agunan)"



**Follow  
Akun tiktok  
Fraksi PKS DPR RI**

**@fraksipksdprri**

# Aleg PKS: Kesejahteraan Rakyat Jauh dari Tercapai, Tapi Beban Bunga Utang Negara **Meningkat**

## KUTIPAN

Jakarta (25/05) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Fahmi Alaydroes menekankan pemerintah perlu lebih serius dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi.

"Karena sejak awal periode Pemerintahan Jokowi target pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak pernah tercapai baik target RPJMN maupun APBN," katanya di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Rabu (25/05).

"Kegagalan mencapai target pertumbuhan menyebabkan pemerintah belum berhasil mencapai amanat konstitusi yaitu kesejahteraan rakyat," ujarnya.

Legislator PKS ini juga menyebut selain kegagalan memenuhi berbagai target yang diamanatkan undang-undang, pertumbuhan ekonomi yang terus melambat menyebabkan Indonesia sulit naik kelas ke negara-negara berpendapatan tinggi atau berada pada middle income trap.

Menurut pengamatan

Anggota Komisi X DPR RI ini bahwa pengalaman negara-negara lain yang mampu keluar dari middle income trap, diperlukan pertumbuhan minimal 7 persen agar bisa melesat ke kelompok berpendapatan tinggi.

"Melihat situasi saat ini, sepertinya sulit mencapai target pertumbuhan 7 persen. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia sebelum pandemi Covid-19 hanya 5 persen. Memenuhi deviasi 2 persen bukanlah pekerjaan mudah, apalagi fundamental ekonomi Indonesia masih sangat rapuh," ujarnya.

Pria yang sering disapa Habib Fahmi ini juga menyebutkan bahwa proyeksi keseimbangan primer yang masih defisit sebesar 0,46-0,65 persen pada 2023 masih

menggambarkan rentannya APBN terhadap beban bunga utang yang harus ditanggung pemerintah.

"Keseimbangan primer yang masih negatif akan menyebabkan pemupukan utang kembali. Artinya bahwa pada 2023, pemerintah belum terbebas dari 'jeratan utang'. Utang bersifat tidak produktif karena digunakan untuk pembayaran utang lama dan beban bunga yang terus bertambah," katanya.

Menurut Anggota DPR RI ini dia mendorong Pemerintah untuk menekan target yield SBN pada 2023.

"Level tersebut masih sangat tinggi sehingga akan membebani APBN. Beban pembayaran bunga utang pemerintah terus meningkat karena tingginya yield surat utang," ujarnya.



**Dr. H. FAHMY ALAYDROES, MM, M.Ed**

Anggota Komisi X DPR RI

"Keseimbangan primer yang masih negatif akan menyebabkan pemupukan utang kembali. Artinya bahwa pada 2023, pemerintah belum terbebas dari 'jeratan utang'. Utang bersifat tidak produktif karena digunakan untuk pembayaran utang lama dan beban bunga yang terus bertambah,"

# Hadiri Halal Bi Halal DPD PKS Purbalingga, Rofik Hananto Berikan Semangat Para Kader

## KUTIPAN

Purbalingga (23/05) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Rofik Hananto membakar semangat kader, simpatisan, dan relawan PKS untuk memenangkan pemilu 2024 di Purbalingga.

Semangat itu disampaikan saat Halal bi Halal DPD PKS Purbalingga di Rumah Berdaya, Blater, Ahad (22/05/2022).

"Target pemilu 2024 sudah dicanangkan. Arahan dari pimpinan sudah disampaikan. Sekarang saatnya kita siap siaga untuk mengambil langkah-langkah strategis. Jangan biarkan semangat yang sudah dibangun hari ini menurun. Saya berharap semangat hari ini akan terus meningkat sampai kita raih kemenangan PKS 2024 di Purbalingga," katanya berapi-api.

"PKS 2024..." teriaknya. "Menang! Menang! Menang!" sambut para kader bergemuruh dengan tangan menggepal ke atas.

Rofik mengingatkan, untuk

meraih kemenangan tidak mudah. Kalau meraih kemenangan mudah maka tidak ada perjuangan. Oleh karena itu dia mengajak semua yang hadir bahwa modal utama meraih kemenangan adalah semangat berjuang.

"Seorang ulama mengatakan, kenikmatan itu tergantung seberapa besar kepedihan untuk menggapainya. Oleh karenanya kenikmatan berupa kemenangan bergantung seberapa besar perjuangan yang kita lakukan. Karena itu saya mengajak semua siap meraih kemenangan dengan bekerja keras," katanya.

Legislator asal Dapil Jateng 7 itu mengingatkan, kalau ingin menang maka kerjanya minimal 2 kali lipat.

Kalau pemilu kemarin kita berhasil dapat 100 suara maka pemilu 2024 naik jadi 200 suara. Tidak ada kemenangan yang diraih dengan leda-lede, onggang-onggang kaki, udat-udut. Yang namanya kemenangan harus diraih dengan kerja keras.

"Pengalaman saya di pemilu 2019, ada yang bilang, Pak, kerjanya nanti ada kalau sudah dekat-dekat pemilu. Tapi tidak saya gubris. Buktinya orang yang ngomong itu tidak dapat suara. Mari mulai sekarang kita kenalkan PKS dengan warna oranye. Kenalkan juga kalau kita ini sebagai kader PKS," ajaknya.

Rofik mengingatkan, pelaksanaan pemilu waktunya tidak lama lagi. Tahun 2023 sudah mulai masa politik yang dimulai dengan pilkades. Dan tahun 2024 bulan Februari sudah pemilu.

"Tidak lama lagi. Mari kita sengkuyung. Kalau kita kerjakan bersama-sama maka yang berat akan terasa ringan. Sekarang saatnya bergandengan tangan untuk memenangkan PKS tahun 2024



## H. ROFIK HANANTO, S.E

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Tengah VII

"kader PKS harus cerdas dengan terus meningkatkan intelektualitas dan kepedulian kepada masyarakat. Keempat, kader harus bijaksana bagaimana komunikasi dengan masyarakat,"

di Purbalingga " katanya.

Sementara anggota DPRD Jawa Tengah Tri Mulyantoro mengatakan, ada 4 hal yang perlu dilakukan para kader PKS. Pertama, terus meningkatkan motivasi. Dan motivasi kita

adalah bagaimana selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT. Kedua, menjadi dinamisator di tengah masyarakat.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

# Hadiri Seminar Parenting, Nevi Zuairina **Sampaikan** Penguatan Anak dengan Al Qur'an

## KUTIPAN

Padang (26/05) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina, pada Seminar Parenting yang di gelar SDIT Ar-Risalah Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota, baru-baru ini menyampaikan betapa pentingnya Al-Qur'an sebagai dasar membangun karakter anak bangsa sejak Usia dini.

Istri mantan Gubernur Sumbar dua periode Irwan Prayitno itu, didaulat menjadi pemateri seminar parenting yang bertajuk 'Mendidik Anak Cinta Al-Qur'an'.

Dihadapan peserta seminar yang terdiri dari orang tua ataupun wali siswa SDIT Ar-Risalah, Nevi menyampaikan pentingnya peran orang tua dalam mendidik anaknya agar sering berinteraksi dengan Al-Qur'an mulai dari membaca, mempelajari, menghafalnya, hingga mempraktekkannya.

"Saya harap peran orang tua atau wali siswa bersama pendidik di SDIT Ar-Risalah Simalanggang dapat berjalan

dengan efektif dalam mewujudkan generasi rabbani yang cinta kepada Al-Qur'an," ucapnya.

Diketahui salah satu alasan mengundang Hj. Nevi yang dikenal di Sumbar sebagai Bunda UMKM ini adalah beliau merupakan ibunda dari 10 anak yang telah sukses menghantarkan anak bahkan cucunya menjadi seorang anak-anak yang terus-menerus menghafal Qur'an tiap harinya.

Pengurus SDIT Ar Risalah yang diwakili kepala sekolahnya menyampaikan banyak ilmu yang sudah diberikan Hj. Nevi tentang bagaimana mendidik generasi pencinta Al Qur'an. Para

Pengurus SDIT berharap ikhtiar sebagai pengelola sekolah termasuk guru bersama orang tua dapat membentuk karakter anak-anak kita untuk terus berpedoman kepada Al Qur'an.

Nevi yang merupakan Politisi PKS Perempuan dari Sumatera Barat II ini mengharapkan, bahwa semua lembaga yang bergerak untuk berkontribusi membangun anak bangsa dapat difasilitasi negara terutama pembangunan sarana prasarana pendidikannya. Karena menurutnya, dengan adanya campur tangan pemerintah maupun lembaga milik pemerintah, akan dapat mengembangkan lembaga pendidikan dengan semakin cepat dan makin besar.

"Alhamdulillah informasi dari pengelola sekolah, bahwa pada tahun ini sudah 43 orang calon siswa SDIT Ar-Risalah Simalanggang yang mendaftar. Semoga sekolah kita terus berkembang, saat ini masih dibuka PPDB gelombang ketiga", tutur Nevi.

Mengakhiri pembicaraannya di forum, Nevi memberi pesan penting akan bagaimana



## Hj. NEVI ZUAIRINA

Anggota Fraksi PKS DPR RI  
Dapil Sumatera Barat II

"Saya harap peran orang tua atau wali siswa bersama pendidik di SDIT Ar-Risalah Simalanggang dapat berjalan dengan efektif dalam mewujudkan generasi rabbani yang cinta kepada Al-Qur'an,"

Al Qur'an ini dapat dipelajari dengan senang dan gembira. Ia menambahkan bahwa penting juga untuk memastikan anak-anak sadar akan manfaat membaca Al-Quran karena mereka akan lebih fokus dengan konten dan menikmati pelajarannya.

"Saat ini perkembangan teknologi digital sangat maju. Ia ibarat pisau, bisa merusak bisa sangat bermanfaat. Kita mesti

dapat memanfaatkan teknologi digital ini sebagai sarana pendidikan yang menyenangkan sehingga anak-anak sangat akrab dengan gadget dan teknologi sekaligus tercapai tujuannya sebagai generasi Qur'ani. Mereka inilah yang akan menjadi generasi-generasi terbaik harapan bangsa, negara, dan agama yang cinta Alquran kedepannya", tutup nevi Zuairina.

# Hadiri Halal Bi Halal PKS di Dapil, Bukhori Ajak Kader Tingkatkan Khidmah untuk Rakyat

## KUTIPAN

Semarang (24/05) --- Anggota DPR RI Fraksi PKS Bukhori Yusuf menghadiri acara halal bi halal yang diselenggarakan oleh DPW PKS Jawa Tengah dan DPD PKS Kota Semarang.

Turut hadir dalam acara tersebut di antaranya Ketua DPW PKS Jawa Tengah yang juga menjabat sebagai Wakil Wali Kota Salatiga Dr. Muh. Haris, Ketua DPD PKS dari masing-masing kota/kabupaten daerah pemilihan Jawa Tengah 1 (Semarang, Kendal, Salatiga), dan segenap anggota PKS.

Dalam sambutannya, legislator dapil Jawa Tengah 1 ini mengajak para anggota PKS untuk meningkatkan khidmah kepada masyarakat sebagai strategi untuk memenangkan Pemilu 2024.

"Sebagai satu-satunya partai yang tegas berada di luar pemerintahan, PKS perlu merawat hubungan baik dengan masyarakat sebagai sekutu utama kita. Fungsi pelayanan

mesti ditingkatkan, giat advokasi harus digencarkan, dan khidmah kita wajib dilakukan secara totalitas," ucap Bukhori di Semarang, Sabtu (21/05/2022).

Anggota Komisi VIII DPR ini juga menekankan soal pentingnya mewujudkan kolaborasi. Dia mengatakan, mengelola negara tidak bisa dilakukan secara sepihak, melainkan perlu dilakukan dengan memadukan berbagai potensi dan sumberdaya dari berbagai pihak.

"Ke-bhinekaan tidak semata tercermin dalam wujud komposisi penduduk kita yang beraneka ragam, tetapi juga ditunjukkan dengan memperkaya khazanah kontribusi yang dapat diberikan oleh setiap anak bangsa untuk memajukan

masyarakat dan negaranya," katanya.

Anggota DPR yang bermitra dengan Menteri Sosial ini turut menyoroti masalah kemiskinan ekstrem yang terjadi di 19 kota/kabupaten di Jawa Tengah. Dia mengatakan, tingginya angka kemiskinan di Jawa Tengah merupakan salah satu tantangan besar yang harus segera diatasi secara kolosal, berkelanjutan, dan bertanggung jawab.

"Pasca pandemi, kontraksi ekonomi dikhawatirkan terjadi sedemikian dalam karena pemerintah mau tidak mau mesti mengembalikan angka defisit APBN yang awalnya melebihi 3 persen menjadi kurang dari ambang batas tersebut pada tahun TA 2023 sesuai amanat UU No. 2/2020. Dampaknya, ini akan berpengaruh terhadap program jaring pengaman sosial yang selama ini diandalkan masyarakat untuk menopang daya tahan sosial ekonomi mereka selama pandemi," jelasnya.

Di sisi lain, demikian Bukhori, di tengah situasi masyarakat yang tengah



**KH. BUKHORI, Lc., M.A.**  
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Tengah I

"Sebagai satu-satunya partai yang tegas berada di luar pemerintahan, PKS perlu merawat hubungan baik dengan masyarakat sebagai sekutu utama kita. Fungsi pelayanan mesti ditingkatkan, giat advokasi harus digencarkan, dan khidmah kita wajib dilakukan secara totalitas"

kesulitan tersebut, risiko terbukanya praktik gelap demokrasi seperti money politics sangat rawan terjadi.

"Praktik demokrasi yang lancang akan melahirkannya pemimpin yang pragmatik dan

memiliki komitmen yang lemah dalam memenuhi kehendak rakyatnya dan lebih berpihak pada pemodalnya," tuturnya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Hadiri Halal Bi Halal DPW PKS DKI Jakarta

# DPW PKS DKI Jakarta, Anis Byarwati Semangati Peserta untuk Raih Kemenangan 2024

## KUTIPAN

Jakarta (27/05) — Suasana bahagia tampak pada acara halal bihalal DPW PKS DKI Jakarta di Candi Bentar Hall, Putri Duyung Resort, Ancol, Jakarta Utara (26/05/2022).

Pada kesempatan ini, Anggota DPR RI Fraksi PKS dari Daerah Pemilihan Jakarta Timur, Anis Byarwati, turut hadir sebagai undangan.

Dalam acara yang berlangsung hangat dan penuh rasa kekeluargaan ini, turut hadir Presiden PKS, Ahmad Syaikh, Wakil Ketua BPW Banjabar, Karyatin Subiyantoro, Ketua DPW PKS DKI Jakarta, Khoirudin, Sekretaris DPW DKI Jakarta, Abdul Aziz, dan seluruh jajaran pengurus DPW PKS DKI Jakarta, seluruh Anggota Legislatif DPRD DKI Jakarta Fraksi PKS, serta fungsionaris PKS tingkat DPD, DPC dan DPRa se-DKI Jakarta .

Pada acara yang

mengangkat tema 'Merajut DPR RI Fraksi PKS dari Daerah Pemilihan Jakarta Timur, Anis Byarwati, turut hadir sebagai undangan. mengangkat tema 'Merajut Ukhwah, Kolaborasi dan Transformasi Menuju Kemenangan PKS 2024' ini, Anis Byarwati memberikan apresiasi atas acara yang meriah dan pemilihan tempat yang sekaligus bisa dijadikan untuk refreshing.

Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini juga berpesan kepada seluruh peserta yang hadir agar kedepan PKS DKI Jakarta semakin bersemangat karena akan mengemban amanah kemenangan yang berat pada tahun 2024 nanti.

"Dalam memenangkan PKS, kita akan berjuang bersama, dengan izin Allah dan

niat yang benar serta ikhlas meraih kemenangan di DKI Jakarta", ungkapnya.

Presiden PKS, Ahmad Syaikh, dalam sambutannya menyampaikan filosofi Lebaran, Laburan, Leburan, dan Luberan, serta menegaskan bahwa PKS akan memulai kemenangannya dengan menekankan pada pentingnya Politik Silaturahmi.

"PKS akan terus optimis, bersemangat, dan bekerja tuntas dalam berkolaborasi dan bertransformasi untuk kemenangan partai ini di tahun 2024", ujarnya.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan, yang turut hadir dan memberikan sambutan, menekankan pentingnya mengingat tujuan berbangsa dan bernegara.

Ia juga menyebutkan pentingnya menegakkan asas keadilan sosial dalam pembangunan di DKI Jakarta bagi seluruh warganya.



**Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag.,M.Si**  
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil DKI Jakarta I

"Kedepan PKS DKI Jakarta semakin bersemangat karena akan mengemban amanah kemenangan yang berat pada tahun 2024 nanti. Dalam memenangkan PKS, kita akan berjuang bersama, dengan izin Allah dan niat yang benar serta ikhlas meraih kemenangan di DKI Jakarta",





# Temui Nakes Honorer dan Non-ASN, Aleg PKS Desak Pemerintah Perhatikan Nasib Mereka

## KUTIPAN

Cirebon (21/05) — Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetyani meminta pemerintah agar memerhatikan nasib tenaga kesehatan yang berstatus honorer dan non-ASN

"Pemerintah harus menjalankan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN di mana tidak ada lagi status pegawai di instansi pemerintah selain Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Apalagi selama dua tahun masa pandemi ini, para nakes telah banyak berkorban dalam membantu penanganan Covid-19," kata Netty saat menerima aspirasi para nakes yang tergabung dalam Forum Pejuang Nakes Honorer Kabupaten Cirebon, Jumat (20/05/2022).

Netty juga menilai pengangkatan nakes menjadi PPPK dapat dilakukan seiring dengan adanya momentum peringatan Hari Kebangkitan

Nasional ke-114 dengan tema 'Ayo Bangkit Bersama'.

Legislator PKS dari Dapil Kota Cirebon, Kab Cirebon dan Kabupaten Indramayu ini mengajak para nakes untuk bangkit bersama.

"Ayo Bangkit Bersama maknanya ialah bangkit bersama-sama setelah dua tahun dilanda pandemi. Bangkit dari keterpurukan, bangkit dari kesulitan, termasuk bangkit membangun sistem kesehatan yang kokoh yang menghargai para nakes secara wajar. Ironis, jika kita bicara jauh-jauh soal kebangkitan, tapi masih banyak nakes yang belum mendapatkan hak-haknya," ungkap Netty.

Oleh karena itu, Netty mendesak pemerintah agar

segera menyiapkan proses pengangkatan nakes secara bertahap dengan serius dan sungguh-sungguh.

"Berikan porsi yang memadai untuk para nakes honorer diangkat menjadi PNS atau PPPK mulai tahun ini."

"Jangan lagi ada nakes yang sudah mengabdikan bertahun-tahun tapi masih berstatus honorer. Apalagi kebanyakan nakes ini berada di puskesmas-puskesmas yang menjadi tujuan masyarakat menengah ke bawah dalam mendapatkan layanan kesehatan," katanya.

Forum Pejuang Nakes Honorer Kabupaten Cirebon saat ini beranggotakan sekitar 1500 nakes yang mengabdikan diri berbagai pusat layanan kesehatan.

"Bahkan tidak sedikit yang sudah menjadi honorer selama lebih dari 20 tahun dengan penghasilan yang minim, jauh dari kata pantas," tambah Netty.



**Dr. Hj. NETTY PRASETYANI, M.Si**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat VIII

"Ayo Bangkit Bersama maknanya ialah bangkit bersama-sama setelah dua tahun dilanda pandemi. Bangkit dari keterpurukan, bangkit dari kesulitan, termasuk bangkit membangun sistem kesehatan yang kokoh yang menghargai para nakes secara wajar. Ironis, jika kita bicara jauh-jauh soal kebangkitan, tapi masih banyak nakes yang belum mendapatkan hak-haknya"



# Dimiyati Natakusumah Kenang **Sulit Cari Suara** Saat Pindah dari PPP ke PKS

## KUTIPAN

Pandeglang (27/05) --- Anggota Komisi III DPR RI Achmad Dimiyati Natakusumah menceritakan pengalaman dirinya hengkang dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan berlabuh ke Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada 2017.

Dimiyati mengaku mendapat sejumlah tantangan usai berpindahannya ke PKS.

Mantan Bupati Pandeglang ini menjelaskan persoalan utamanya ialah mencari suara. Usai angkat kaki dari PPP, Dimiyati sempat kesulitan meraup suara.

Menurut Dimiyati, selama ini dirinya dikenal masyarakat dipalnya di Banten sebagai kader PPP, bukan PKS.

"Orang tahunya kan saya PPP. Sulit sekali menginformasikan kepada seluruh masyarakat. Lambat laun sudah hafal saya di PKS," ujar Dimiyati saat dihubungi, Rabu (25/5/2022).

Dimiyati mengungkapkan warga di Banten seperti Lebak dan Pandeglang mengenal dirinya sebagai 'Dimiyati PPP'. Dia turut menceritakan banyak

orang mencari namanya di PPP, namun tidak ketemu.

Meski demikian, hal tersebut tidak menyurutkan niat Dimiyati untuk tetap dikenal masyarakat. Dimiyati berkomitmen untuk menggccarkankan sosialisasi bahwa dirinya sudah pindah ke PKS.

"Saya harus push betul di Lebak supaya orang tahu Dimiyati ada di PKS. Sulit sebetulnya. Orang mau milih lihat partai dulu baru cari orang, bukan cari orang baru lihat partai," tutur pria yang pernah menjabat wakil ketua MPR itu.

Dimiyati merasa beruntung pada 2019 dirinya tetap mendapat suara yang cukup. Pada 2024, Dimiyati percaya diri bisa mendapat suara yang lebih banyak ketimbang 2019 karena orang-orang sudah mengenal-

nya sebagai 'Dimiyati PKS'.

Lebih jauh, Dimiyati mengungkapkan sisi lain dari keputusannya untuk keluar dari PPP. Dimiyati merasa kasihan dengan konstituennya apabila hanya dia tak berkiprah lagi di dunia politik.

"Kasihannya terutama konstituen saya. Kedua adalah masyarakat saya yang ada di dapil, ada di Banten. Makanya saya harus tetap berkiprah, tetap harus eksis di tingkat nasional untuk bantu daerah yang ada di Banten," kata mantan calon gubernur Banten ini.

Nyaman Dimiyati menyatakan dirinya nyaman di rumah barunya di PKS. Dia berharap dapat memberikan kontribusi yang lebih baik lagi untuk kendaraan politik barunya ini.

Keputusannya untuk pindah dari PPP pun sudah disetujui keluarga.

Lebih jauh, Dimiyati turut berharap PKS bisa menjadi penguasa selepas Pemilu 2024.

"Menjadi partai yang betul-betul memenangkan pemilu dan berkuasa terhadap pencalonan Presiden dan Cawapres PKS menang," imbuhnya.



**DR. H. R. A. DIMYATI  
NATAKUSUMAH, SH, MH**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Banten I

"Saya harus push betul di Lebak supaya orang tahu Dimiyati ada di PKS. Sulit sebetulnya. Orang mau milih lihat partai dulu baru cari orang, bukan cari orang baru lihat partai"

# Live Interactive

Bersama  
Anggota  
Legislatif PKS



ERLANDA

WIDYA

YOANDRO



## Saksikan Setiap Jum'at

pk. 13.30 s.d 14.30 WIB



# Dirosah Kebangsaan, Wakil Ketua MPR Minta Hormati Keberagaman Umat Manusia

## KUTIPAN

Boyolali (27/05) --- Wakil Ketua MPR Dr. Hidayat Nur Wahid (HNW) MA., meminta agar generasi muda yang menempuh pendidikan di pesantren selain fokus untuk belajar dan menghafal Al Quran, juga mengamalkan ajaran Al Quran tentang menghormati keberagaman umat manusia.

Hal itu berkaitan dengan diselenggarakannya Dirosah Kebangsaan dengan tema "Pesantren Sebagai Salah Satu Pilar Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan", di Pondok Pesantren Tahfizhul Quran (PPTQ) Daarul Fath, Pengging, Kecamatan Teras, Boyolali, Jawa Tengah, belum lama ini.

"Sebagai umat Islam kita wajib bekerja sama dengan kelompok manapun," kata HNW.

Keberagaman suku, agama, bahasa, dan perbedaan yang lainnya yang ada di Indonesia menurut pria asal Klaten, Jawa Tengah, itu juga perlu dipahami dan mengerti oleh para santri dan santriwati.

"Kita perlu bekerja sama dalam kebaikan dan kebijakan yang tidak melanggar hukum," tambahnya.

Keberagaman yang ada, kata dia, untuk diharmonisasikan bukan malah dijadikan sarana untuk memecah belah, adu domba, atau saling menegasi.

"Para santri dan santriwati pasti menghafal aya-ayat tentang keberagaman," tuturnya.

Ayat-ayat seperti itu disebut harus diamalkan atau diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

"Dari sinilah, pesantren akan menjadi pilar yang kuat

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," ujar dia.

HNW mengatakan peserta Dirosah Kebangsaan bukan generasi muda biasa. Mereka adalah generasi muda calon penghafal Al Quran. Sebagai generasi muda yang didik di lembaga pendidikan agama Islam, para santri itu akan menjadi pelanjut, penerus, dan pengganti ulama, kiai, dan ustad yang ada.

"Mereka juga akan menjadi generasi penerus bangsa", ujar pria alumni Pondok Pesantren Gontor itu.

Menurut HNW, sosialisasi Empat Pilar MPR dilakukan dengan berbagai kelompok dan segmen masyarakat. Pondok pesantren yang memiliki peran strategis di masyarakat disebut sering dan banyak dilibatkan dalam sosialisasi. "Sosialisasi yang dilakukan oleh MPR direpson baik oleh pesantren," tutur dia.



**Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A**  
Wakil Ketua MPR RI

"Peserta Dirosah Kebangsaan bukan generasi muda biasa. Mereka adalah generasi muda calon penghafal Al Quran. Sebagai generasi muda yang didik di lembaga pendidikan agama Islam, para santri itu akan menjadi pelanjut, penerus, dan pengganti ulama, kiai, dan ustad yang ada. Mereka juga akan menjadi generasi penerus bangsa",



image istimewa

# Mencari Kalimatun Sawa



OLEH

**Dr. SALIM SEGAF ALJUFRI, MA**

Ketua Majelis Syura PKS dan  
Wakil Ketua Umum Persatuan Ulama Muslim Sedunia

Dalam kitab suci al-Qur'an, istilah kalimatun sawa' bermakna satu pernyataan atau keyakinan yang mempertemukan berbagai perbedaan.

Dalam konteks keyakinan beragama, kalimat yang sama itu adalah "tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah." (QS Ali Imran: 64).

Ulama modern asal Aceh, Hasbi as-Shiddiqy menggunakan istilah kalimatun sawa' sebagai konsep kesepakatan di tengah perbedaan keyakinan, tidak hanya menyangkut masalah keagamaan, namun juga masalah kemasyarakatan dan kebangsaan. Pandangan ini sangat relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia yang bersifat majemuk, tapi memiliki komitmen bersama.

Komitmen itu telah dibangun sejak Sumpah Pemuda 1928 dengan inisiator tokoh-tokoh organisasi kepemudaan dari berbagai daerah Nusantara, yakni Jong Java, Jong Ambon, Jong Celebes, Jong Batak, Jong Sumatranen Bond, Jong Islamiyeten Bond, Sekar Rukun, PPKI, Pemuda Kaum Betawi, dan lain-lain.

Kesepakatan dasar tentang Tanah Air, Bangsa dan Bahasa yang satu dibahas

kembali secara mendalam pada sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) tanggal 28 Mei - 1 Juni 1945.

Sejumlah tokoh tampil menjawab pertanyaan Ketua BPUPK tentang apa dasar negara yang disepakati, jika Indonesia merdeka? Pidato Ir. Soekarno menjadi momentum puncak (lahirnya istilah Pancasila), disamping pidato Mr. Mohammad Yamin, Mr. Soepomo dan tokoh lain yang tak tercatat.

Episode itu berlanjut dengan pembahasan resmi dalam sidang marathon yang diakhiri dengan kesimpulan oleh Panitia Sembilan sebagai Piagam Jakarta (22 Juni 1945).

Naskah piagam inilah yang direncanakan akan dibacakan dalam momen proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, kondisi domestik penuh ketidakpastian dan situasi dunia juga berubah dengan cepat, sehingga teks proklamasi kemerdekaan Indonesia (17 Agustus 1945) dirumuskan secara mendadak oleh Soekarno dan Hatta.

Sehari setelah proklamasi (18 Agustus 1945) dilakukan sidang lanjutan oleh Panitia

## Mencari Kalimatun Sawa (2)

Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PKI) yang menyepakati Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Dalam Pembukaan UUD 1945 tercantum rumusan resmi tentang dasar negara Republik Indonesia: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan resmi itu dikenal sebagai Pancasila.

Terlihat jelas, dari proses sejarah yang panjang bahwa Pancasila merupakan kristali-

sasi dari nilai-nilai yang disepakati oleh para Pendiri Bangsa Indonesia sebagai refleksi dari kesadaran kolektif seluruh rakyat Indonesia. Kita bersyukur bahwa titik temu dan kesepakatan historik itu dicapai melalui jalan dialog dan musyawarah, bukan dipaksakan oleh satu pihak dengan kekerasan atau dicangkokkan oleh kekuatan asing yang ingin bercokol di Indonesia.

Bangsa Indonesia sudah menunjukkan kualitas luhur dengan mencapai kalimatun sawa' dalam konteks nasionalisme modern. Bagimanakah kita mencapai titik temu di masa kini?

Konteks sejarah kini

Bangsa Indonesia menghadapi polarisasi politik sebagai dampak dari penyelenggaraan demokrasi yang belum sempurna.

Sejak pemilihan umum 2014 dan berjalan pemilu 2019, pembelahan politik itu merasuk hingga ke kelompok masyarakat akar rumput. Cukup mengkhawatirkan karena bisa menuju disintegrasi bangsa, bila tidak segera ditangani dengan serius.

Sebenarnya di tingkat elite politik telah terjadi semacam rekonsiliasi dan kompromi, namun ada saja kelompok yang tidak puas lalu mengeksplotasi perbedaan kepentingan menjadi pembelahan sikap politik. Kondisi itu diperparah dengan percakapan publik yang berlangsung liar di media sosial melibatkan para para buzzer dan provokator.

Terbangun persepsi kelompok yang semakin mengeras dan terjadi jurang komunikasi yang semakin lebar.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai entitas politik yang lahir pasca reformasi 1998, menyadari bahaya itu. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun yang ke-20 di Istora Senayan (29/5) mengundang sejumlah tokoh nasional, termasuk pimpinan partai politik, untuk menyampaikan gagasan demi mengakhiri polarisasi. Titik



Sejumlah tokoh tampil menjawab pertanyaan Ketua BPUPK tentang apa dasar negara yang disepakati, jika Indonesia merdeka? Pidato Ir. Soekarno menjadi momentum puncak (lahirnya istilah Pancasila), disamping pidato Mr. Mohammad Yamin, Mr. Soepomo dan tokoh lain yang tak tercatat.

temu yang ditawarkan adalah kolaborasi melayani Indonesia.

Tokoh yang hadir dan berpidato langsung antara lain Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (perlu nya mendorong titik tengah), Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar (tidak ada jalan lain menghadapi tantangan, kecuali berkolaborasi dengan semangat Islam rahmatan lil alamin), Menteri Pariwisata dan Ekonomi

Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, sekaligus Wakil Ketua Partai Gerindra (kemajuan Indonesia hanya bisa dicapai dengan sinergi dan kolaborasi), Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (urgensi persatuan di atas kemajemukan).

Sementara itu, tokoh yang menyampaikan pandangan secara virtual adalah Jusuf Kalla (posisi sebagai oposisi tidak menghalangi parpol

### KUTIPAN

Terlihat jelas, dari proses sejarah yang panjang bahwa Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang disepakati oleh para Pendiri Bangsa Indonesia sebagai refleksi dari kesadaran kolektif seluruh rakyat Indonesia. Kita bersyukur bahwa titik temu dan kesepakatan historik itu dicapai melalui jalan dialog dan musyawarah, bukan dipaksakan oleh satu pihak dengan kekerasan atau dicangkokkan oleh kekuatan asing yang ingin bercokol di Indonesia.

# Mencari Kalimatun Sawa (tamat)



PKS bersyukur bisa menjadi tuan rumah bagi Silaturahmi Kebangsaan yang dibutuhkan menjelang pergantian kepemimpinan nasional pada tahun 2024 nanti. Demokrasi Indonesia harus semakin matang. Kemantapan sistem demokrasi di Indonesia sedang diuji, sekali lagi, melalui pergiliran kekuasaan secara damai.

berkontribusi menjaga demokrasi), Ketua Umum Nasdem Surya Paloh (kontestasi politik sebagai keniscayaan dan kolaborasi sebagai tanda kematangan

berpolitik), Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (dengan ideologi kekaryaan siap bekerjasama memakmurkan Indonesia), Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti

Yudhoyono (kolaborasi politik untuk memberi solusi bagi persoalan rakyat merupakan imperatif), Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa (semangat persatuan untuk kemajuan bangsa) dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (keterbukaan dengan semua elemen strategis).

Milad PKS memang bukan kongres pemuda atau sidang BPUPK, bukan pula konvensi nasional untuk menentukan calon presiden RI tahun 2024. Namun, segenap tokoh yang berpotensi tampil dalam percaturan nasional telah hadir mengungkapkan gagasannya. Disamping itu, pimpinan parpol yang paling berpengaruh telah menyatakan secara terbuka siap bergandeng tangan mencari solusi di tengah gejala polarisasi dan kebuntuan politik. Separuh jawaban sudah terungkap, tinggal komunikasi politik yang lebih intensif untuk mewujudkan koalisi konstruktif.

Sebagaimana pendiri bangsa mencapai kesepakatan tentang dasar negara Pancasila di awal kemerdekaan, maka kita perlu mencari titik temu di tengah situasi transisi saat ini. Jangan sampai kita membongkar dan mengorbankan ikatan kebangsaan yang sudah dirajut generasi perintis.

PKS bersyukur bisa menjadi tuan rumah bagi

Silaturahmi Kebangsaan yang dibutuhkan menjelang pergantian kepemimpinan nasional pada tahun 2024 nanti. Demokrasi Indonesia harus semakin matang. Kemantapan sistem demokrasi di Indonesia sedang diuji, sekali lagi, melalui pergiliran kekuasaan secara damai. Kita mengenal prinsip perubahan dan kesinambungan (Change and Continuity). Perubahan diperlukan untuk memberi peluang bagi kemajuan, sebagaimana perubahan merupakan

sunnatullah (hukum alam) yang berlaku dalam berbagai lapangan kehidupan. Sementara itu, kesinambungan juga diperlukan agar upaya mewujudkan cita-cita Proklamasi Indonesia (1945) tidak terputus di tengah jalan. Harus ada estafeta perjuangan bangsa dari generasi ke generasi, jangan sampai diinterupsi atau terdisrupsi hanya karena pergantian kekuasaan.

Mari duduk bersama untuk mencapai kalimatun sawa'.

## KUTIPAN

Milad PKS memang bukan kongres pemuda atau sidang BPUPK, bukan pula konvensi nasional untuk menentukan calon presiden RI tahun 2024. Namun, segenap tokoh yang berpotensi tampil dalam percaturan nasional telah hadir mengungkapkan gagasannya. Disamping itu, pimpinan parpol yang paling berpengaruh telah menyatakan secara terbuka siap bergandeng tangan mencari solusi di tengah gejala polarisasi dan kebuntuan politik. Separuh jawaban sudah terungkap, tinggal komunikasi politik yang lebih intensif untuk mewujudkan koalisi konstruktif.

# PROGRAM UNGGULAN

## FRAKSI PKS DPR RI



FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
*Kecatif Atrokratif Substantif*

**Parlementaria** ( Diskusi Publik,  
PKS Legislative Corner, PKS Legislative Report,  
Ruang Aleg dan Internships)



Diskusi, dialog, dan kolaborasi Fraksi PKS dengan pejabat publik, pakar, ahli, tokoh CSO, dan aktivis yang kompeten serta generasi muda untuk membahas, mengkaji, dan terlibat pada isu-isu publik dari sudut pandang parlemen.



# Puncak Milad ke-20 PKS, Dr. Salim Ajak Seluruh Pihak Bersama dan Berkolaborasi Bangun Bangsa

**KUTIPAN**

Jakarta (29/05) --- Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Dr. Salim Segaf Al-Jufri mengucapkan rasa syukur atas keberhasilan Indonesia melewati masa Pandemi Covid-19, dalam Puncak Milad ke-20 di Istora Senayan, Jakarta, Ahad, (29/5/2022).

Menurut Dr. Salim, ada tiga hikmah dalam bersyukur atas keberhasilan bangsa Indonesia melewati Pandemi Covid-19 selama kurang lebih dua tahun ini.

"Pertama, kita perlu kembali pada jati diri bangsa Indonesia. Bangsa kita saat ini memiliki kepekaan hati, memiliki semangat untuk tolong menolong dan memiliki keinginan untuk saling berbagi," ungkap Dr. Salim.

Kedua, imbuhnya, "JAS MERAH" atau Jangan sekali-kali kita melupakan sejarah. Sejarah bangsa Indonesia ini membuktikan bahwa dengan kebersamaan kita bisa sukses.



"Kebersamaan adalah kunci sukses bangsa kita. Kita lihat bagaimana tokoh bangsa Bung Karno, Hatta dan Bung Syahrir memiliki Semangat kebersamaan. Kita lihat dengan tokoh lain yang berbeda agama mereka bisa bersama-sama membangun Indonesia. Ini membuat kita saling kuat, solid untuk membangun Bangsa kita," tegas Menteri Sosial Kabinet Indonesia Bersatu jilid

II ini.

Ketiga, kata Dr. Salim, kita semakin bisa menghadapi berbagai tantangan di masa yang akan datang baik dari luar maupun dalam negeri kita.

"Tantangan kita bukan hanya berkaitan dengan yang ada di dalam negeri. Namun juga Persoalan di Luar Negeri salah satunya kemerdekaan Palestina. NKRI kita terwujud salah satunya dengan menjaga ketertiban dunia," tegas Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi dan Oman 2005-2009 ini.

Kolaborasi, kata Dr. Salim, tidak akan terwujud manakala tidak ada kita harus berubah cara berpikir kita. "Rubah cara komunikasi kamu maka akan merubah dunia. Dengan mengubah kata maka kita akan mengubah bangsa yang kita cintai," jelasnya.

Puncak acara Milad ke-20 PKS dihadiri beberapa tokoh politik diantaranya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Wakil Ketua Umum Partai



**Dr. SALIM**  
Ketua Majelis Syuro PKS

"Kebersamaan adalah kunci sukses bangsa kita. Kita lihat bagaimana tokoh bangsa Bung Karno, Hatta dan Bung Syahrir memiliki Semangat kebersamaan. Kita lihat dengan tokoh lain yang berbeda agama mereka bisa bersama-sama membangun Indonesia. Ini membuat kita saling kuat, solid untuk membangun Bangsa kita,"

Demokrat Edhi Baskoro  
Yudhoyono, Wakil Ketua Umum  
Partai Nasdem Rachmat Gobel,  
Sekretaris Jenderal Partai  
Persatuan Pembangunan

Arwani Thomafi, Gubernur NTB  
Zulkieflimansyah, serta  
Gubernur Sumbang Mahyeldi  
Ansharullah.



# Aleg PKS: Tema Milad PKS **Ekspresi Cinta NKRI**

## KUTIPAN

Jakarta (29/05) — Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mustafa Kamal mengungkapkan tema acara Puncak Milad ke 20 PKS merupakan ekspresi cinta terhadap Indonesia.

"Ini merupakan ekspresi dari cinta terhadap NKRI. Cinta adalah melayani, dan PKS alhamdulillah menjadi pelopor dalam pelayanan bangsa mulai dari rakyat kecil sampai pelayanan pada publik rakyat umum. Kita selalu berikhtiar untuk memberikan yang terbaik. Kita berkhidmat untuk masyarakat dan negara ini," kata Mustafa saat diwawancarai di acara Puncak Milad ke 20 PKS, Ahad (29/05/2022).

Mustafa menambahkan pada usia PKS yang ke-20 ini mudah-mudahan bisa menemukan rekan dalam berkolaborasi melayani Indonesia.

"Mudah mudahan hari ini pada usia ke 20 tahun, kita mempunyai rekan untuk berkolaborasi, bermitra. Insha Allah di tahun 2024, apakah dalam bentuk pilpres atau dalam bentuk bentuk sinergi



yang lainnya bersama kekuatan bangsa yang lainnya. Karena kita tidak mungkin dalam amarah memperjuangkan reformasi ini sendirian," ujar Mustafa.

Mustafa juga bersyukur masa-masa pasang surut PKS sampai saat ini masih bisa beristiqomah.

"Kita lahir di era reformasi, sungguh perjalanan yang tidak mudah kita memerlukan satu rumusan reformasi yang bisa diterjemahkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Dan hari ini alhamdulillah PKS tetap istiqomah," ucap Mustafa.



## **H. MUSTAFA KAMAL, S.S.**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sumatera Selatan I

"Ini merupakan ekspresi dari cinta terhadap NKRI. Cinta adalah melayani, dan PKS alhamdulillah menjadi pelopor dalam pelayanan bangsa mulai dari rakyat kecil sampai pelayanan pada publik rakyat umum. Kita selalu berikhtiar untuk memberikan yang terbaik. Kita berkhidmat untuk masyarakat dan negara ini,"



# Pesan Utama Presiden PKS di Puncak Milad ke- 20: Mari Kolaborasi Bukan Polarisasi

## KUTIPAN

Jakarta (29/05) --- Presiden PKS Ahmad Syaikhul Mubtadin memberikan Pidato Kebangsaan dalam Puncak Milad 20 PKS di Istora Senayan, Jakarta, Ahad (29/5/2022).

Pesan penting yang disampaikan Syaikhul Mubtadin di hadapan puluhan ribu kader PKS dan berbagai tokoh nasional adalah semangat kolaborasi.

"Kita hadir dalam peringatan MILAD ke-20 PKS ini dengan satu semangat, satu misi, dan satu harapan yang sama, yaitu: Kolaborasi Melayani Indonesia. Kolaborasi itu sangat penting, ibarat sebuah rumah. Rumah hanya akan terbangun jika ada pondasi, tiang, atap, dan dinding yang bersatu padu dan saling menguatkan," tegas Syaikhul Mubtadin.

Syaikhul Mubtadin mengatakan, saat ini semua pihak merasakan betapa pentingnya arti kolaborasi. Hampir satu dekade terakhir ini, bangsa Indonesia telah mengalami pembelahan sosial. Pemilu 2014 dan 2019 menjadi pelajaran yang sangat



berharga untuk semua. Menjadi tugas seluruh agar menjadikan pemilu tahun 2024 sebagai era baru politik Indonesia. Politik yang mencerahkan dan menggerakkan kemajuan bangsa.

Bagi Syaikhul Mubtadin, perbedaan pilihan adalah sebuah keniscayaan dalam alam demokrasi. Tidak ada demokrasi tanpa perbedaan pilihan. Justru karena berbeda itulah bangsa ini menjadi bangsa yang besar. Bangsa yang bisa melahirkan karya-karya terbaiknya. Kuncinya adalah bagaimana kita mampu

mengelola keberagaman.

"Saya meyakini bahwa bangsa Indonesia membutuhkan politik kolaborasi, bukan segregasi apalagi polarisasi. Politik yang menjadikan keutuhan bangsa dan negara di atas kepentingan individu, golongan dan kekuasaan. Politik yang membentangkan harapan dan rasa persatuan bukan membentangkan rasa ketakutan dan keterbelahan," kata Syaikhul Mubtadin.

Syaikhul Mubtadin menegaskan, semua elemen bangsa memiliki tanggungjawab yang besar untuk mengakhiri kondisi keterbelahan di tengah-tengah masyarakat.

"Luka-luka harus kita sembuhkan. Rasa sakit harus kita pulihkan. Halaman baru politik Indonesia harus kita bentangkan bersama," tuturnya.

"Kontestasi politik sesungguhnya adalah perlombaan untuk memperjuangkan nilai-nilai kebaikan dan kemaslahatan warga negara bukan perlombaan untuk saling menjatuhkan dan menaburkan rasa curiga dan permusuhan sesama anak bangsa," imbuh Syaikhul Mubtadin.



**H. AHMAD SYAIKHU**  
Presiden PKS

"Saya meyakini bahwa bangsa Indonesia membutuhkan politik kolaborasi, bukan segregasi apalagi polarisasi. Politik yang menjadikan keutuhan bangsa dan negara di atas kepentingan individu, golongan dan kekuasaan. Politik yang membentangkan harapan dan rasa persatuan bukan membentangkan rasa ketakutan dan keterbelahan,"

# Sampaikan Rangkaian Milad, Habib Aboe: PKS Ajak Seluruh Komponen Bangsa Kolaborasi

## KUTIPAN

Jakarta (29/05) --- Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Habib Aboe Bakar Al Habsyi menyampaikan laporan kegiatan puncak peringatan Milad PKS ke-20 di Istora Senayan, Jakarta, Ahad (29/5/2022).

Puncak acara Milad PKS dihadiri beberapa tokoh politik diantaranya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhi Baskoro Yudhoyono, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Rachmat Gobel, Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Arwani Thomafi, Gubernur NTB Zulkieflimansyah, serta Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah.

Dalam sambutannya, Habib Aboe menyampaikan puncak kegiatan Milad PKS ke-20 terdiri dari beberapa rangkaian acara.

"Perayaan Milad PKS



dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan yang panjang, mulai tasyakuran pada tanggal 20 April, kemudian ada tebar 2 juta Paket Ramadhan, kegiatan lainnya Posko Mudik Dr. Salim, yang didirikan di 15 Provinsi sebanyak 150 posko mudik di siapkan," ucap Aboe.

Habib Aboe mengatakan, rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk melengkapi kebahagiaan kepada para anggota dan simpatisan PKS

yang berkumpul di Istora Senayan.

"Untuk memeriahkan kegiatan diadakan beberapa jenis kegiatan, pada Milad ini kita juga memberikan penghargaan PKS award kepada Bidang Badan dan anggota DPR RI," kata Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI itu.

Lebih jauh, Habib Aboe menjelaskan tema Milad yang diusung bertema kolaborasi, dengan tujuan mengajak seluruh komponen bangsa untuk berkolaborasi membangun Indonesia.

"Tema Milad ini kolaborasi melayani Indonesia ini adalah semangat PKS melayani untuk negeri, kita mengajak seluruh komponen bangsa untuk berkolaborasi memberikan pelayanan terbaik untuk Indonesia," tutur Anggota Komisi III DPR RI ini.

"Secara khusus pada Milad ini kami mengundang pengurus partai politik untuk bicara sebagai upaya menumbuhkan semangat kolaborasi untuk Indonesia," pungkasnya.



**HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI**  
Sekjen DPP PKS

"Tema Milad ini kolaborasi melayani Indonesia ini adalah semangat PKS melayani untuk negeri, kita mengajak seluruh komponen bangsa untuk berkolaborasi memberikan pelayanan terbaik untuk Indonesia,"



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA



# *Salurkan* **ASPIRASI ANDA** **DI HARI ASPIRASI** **FRAKSI PKS DPR RI**

Kegiatan Aspirasi dilaksanakan  
setiap Selasa dan Jum'at.

Ajuan Aspirasi

Isi via website form : <https://fraksi.pks.id/form-aspirasi-2/>

Kritik Pengibaran Bendera LGBT  
di Kedubes Inggris

## HNW Ingatkan agar Hormati HAM di Indonesia

### KUTIPAN

Jakarta (23/05) --- Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid, mengkritik tindakan Kedutaan Besar Inggris di Jakarta yang mengibarkan bendera yang melambangkan Lesbian Gay Biseksual dan Transgender (LGBT)

dengan alasan hak asasi manusia, tanpa mempertimbangkan aspek lokalitas HAM yang diterima secara konstitusional dan berlaku di Indonesia yang mementingkan aspek hukum, sosial budaya dan agama yang ada di Indonesia.

"Tindakan sepihak tersebut patut dikecam. Meski dilakukan di wilayah Kedubes Inggris di Jakarta, tetapi mestinya pihak Kedubes Inggris tetap menghormati norma diplomatik untuk menjaga hubungan baik dengan Indonesia, dengan menjauhkan diri dari melakukan tindakan provokatif yang bisa memantik masalah, karena tindakan yang tidak mengindahkan aspek lokalitas HAM itu

bisa disebut sebagai salah satu bentuk imperialisme hak asasi manusia (human rights imperialism) dalam bentuk pengibaran bendera LGBT dan keterangan resmi Kedubes yang sudah dipublikasikan yang justru bisa dinilai sebagai jenis imperialisme HAM dengan memaksakan paham HAM asing yang dianutnya, dengan mengabaikan aspek lokalitas HAM yang dianut di Indonesia yang secara prinsip tidak sama dengan yang dilakukan oleh Kedubes Inggris itu"ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Senin(23/05).

HNW sapaan akrabnya mengatakan sikap yang mempropagandakan dengan

'memaksakan' dukungan terhadap LGBT di Indonesia, suatu Negara berdaulat yang dasar dan ideologi negara Pancasila dan UUD-nya menegakkan tentang Ketuhanan Yang Maha Esa.

"Sementara Parlemen dan Pemerintahnya sedang memproses RUU KUHP yang berisi diantaranya pemidanaan soal LGBT, serta masyarakatnya terkenal religius dengan merujuk kepada sila 1 dari Pancasila serta pasal 29 ayat 1 UUDNRI 1945, pengibaran bendera LGBT itu menimbulkan keresahan, polemik dan penolakan dari masyarakat luas," tegas pria yang akrab disapa HNW ini.

Dan itu, imbuhnya, terbuka dengan penolakan-penolakan dan kritik terbuka dari banyak Warga maupun Ormas-Ormas Islam seperti MUI, Muhammadiyah, NU Jawa Timur, Akademisi, juga beberapa Fraksi di DPR RI seperti FPKS dan FPPP, bahkan komisi I DPR RI mengkritik dan menyebut Dubes Inggris tidak menghormati etika berdiplomasi dan norma hukum yang diakui di Indonesia.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



**Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A**

Wakil Ketua MPR RI

"Wajarnya KemLu RI tak cukup hanya menyayangkan dan meminta klarifikasi, tetapi memanggil Dubes Inggris, untuk menyampaikan nota protes dari Pemerintah Indonesia, agar Dubes Inggris minta maaf secara terbuka dan tidak lagi melakukan hal yang provokatif dengan tidak menghormati norma diplomatik dan nilai hukum dan HAM yang berlaku di Indonesia seperti dengan pengibaran bendera LGBT itu"



# Presiden PKS Bertemu Rhoma Irama, Bahas Islamic Center hingga Piplres 2024

## KUTIPAN

Depok (26/05) --- Presiden PKS Ahmad Syaikhul bertemu Rhoma Irama di Studio Soneta, Depok, Jawa Barat, Selasa (24/5) sore. Kedua tokoh nasional itu membicarakan berbagai persoalan. Dari pembangunan Islamic Center di Karawang hingga Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Syaikhul mengaku senang dengan pertemuan ini. Karena Sang Raja Dangdut sosok yang mampu memajukan seni dan dakwah melalui lagu-lagu yang diciptakannya.

"Pastinya saya sangat senang. Sebab Bang Haji Rhoma Irama seniman hebat. Tak cuma bernyanyi namun bisa memasukkan nilai-nilai dakwah dalam lirik lagunya," kata Syaikhul.

Syaikhul dan Rhoma Irama berdiskusi soal keumatan. Yakni bagaimana mengokohkan peran dakwah dan ikut berkontribusi dalam membangun negeri.

"Kita mengetahui bahwa Bang Haji Rhoma Irama adalah

salah satu pendiri Fahmi Tamami (Forum Silaturrehmi Ta'mir Masjid dan Mushalla). Aktifitas utamanya adalah merangkul berbagai kalangan untuk memakmurkan dan menjaga masjid dari pihak-pihak yang ingin merusak tradisi positif yang telah dijalankan umat Islam," ungkap Syaikhul.

Kepedulianya terhadap dakwah tidak diragukan lagi. Rhoma Irama saat ini tengah membangun Islamic Rhoma Irama Centre di Karawang Jawa Barat. Luas lahannya sekitar 4,5 hektar.

Semoga saja kiprah dakwah beliau akan

dimudahkan jalannya oleh Allah SWT dan . apa yang dicita-citakan Bang Haji Rhoma Irama dapat terwujud," ujar Syaikhul.

Keduanya juga sempat menyinggung soal Pilpres 2024. Syaikhul menegaskan bahwa PKS siap bekerjasama dengan semua elemen bangsa dalam Pilpres 2024 mendatang.

"PKS siap kolaborasi dengan sebanyak mungkin anak bangsa. Apalagi jika memiliki komitmen yang sama untuk memajukan bangsa dan negara," tegas Syaikhul.

Rhoma Irama sendiri merasa bersyukur dapat bersilaturahmi dengan Presiden PKS. Menurutnya ini sebuah kehormatan.

"Pertemuan ini dalam rangka ta'awun (saling menolong), yang kedua bagaimana ke depan kita bersama-sama berkontribusi untuk Indonesia yang lebih baik," kata Rhoma.



**H. AHMAD SYAIKHU**

Presiden PKS

"PKS siap kolaborasi dengan sebanyak mungkin anak bangsa. Apalagi jika memiliki komitmen yang sama untuk memajukan bangsa dan negara,"



# Dr. Salim Tiba di Aceh **Disambut Meriah** dengan Shalawat dan Rapa'i Bur'am

## KUTIPAN

Banda Aceh (26/05) --- Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dr. Salim Segaf Al Jufri disambut langsung Ketua DPW PKS Aceh, Tgk Makhyaruddin Yusuf dan seluruh pengurus PKS Aceh saat tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM) Aceh Besar pada Kamis (26/05).

Ketua Majelis Syura PKS beserta rombongan tiba sekitar pukul 13.25 WIB dan disambut meriah dengan shalawat juga pawai muhibbah atraksi Rapa'i Bur'am.

"Selamat datang, Saleum Troh Teuka di Bumoe Aceh Seuramoe Mekkah," ucap Ketua DPW PKS Aceh, Tgk Mahyaruddin Yusuf saat menyambut kedatangan Ketua Majelis Syura, Dr Salim Segaf Al Jufri di Bandara SIM, Aceh Besar.

Kedatangan Dr Salim ikut didampingi Ketua Fraksi PKS DPR RI, Dr Jazuli Juwaini serta

Anggota DPR RI Fraksi PKS, Nasir Djamil dan Rafly Kande.

Dalam kunjungannya ke Aceh Besar dan Banda Aceh, Dr Salim yang pernah menjabat Menteri Sosial RI ini dijadwalkan mengikuti serangkaian kegiatan.

Setelah dari Bandara SIM, Dr Salim dan rombongan akan bertolak menuju ke Meuligoe Wali Nanggroe untuk dipeusijuek.

Rombongan selanjutnya bersilaturahmi ke Harien Serambi Indonesia, Aceh Besar.

Kemudian mengunjungi festival UMKM di D'Energy

Caffe, Kec Darul Imarah, Aceh Besar. Pada pada Kamis malam, Dr Salim dijadwalkan melakukan silaturahmi dengan Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA) di Kyriad Hotel Banda Aceh.

Keesokannya Jumat (27/5/2022) rombongan Dr Salim juga bertemu dengan Gubernur Aceh, Nova Iriansyah di Pendopo Gubernur Aceh.

Kemudian dilanjutkan dengan berziarah ke Makam Habib Abu Bakar (Teungku Dianjong) di Desa Pelanggahan, Banda Aceh.

Selain itu, Dr Salim juga dijadwalkan menjadi khatib Jumat di masjid kebanggaan masyarakat Aceh, yakni Masjid Raya Baiturrahman.



**Dr. SALIM**  
Ketua Majelis Syura PKS

Riset tidak boleh ditujukan hanya untuk riset saja. Lembaga riset seperti BRIN tidak boleh hanya menjadi 'Menara Gading', yang dipandang indah tetapi manfaatnya kurang terasa bagi masyarakat. Jangan sampai aset dan SDM Pusat Veteriner yang diambil alih dari Kementan ini malah tidak bisa berkontribusi secara maksimal dalam penanganan wabah ini,"



# Gubernur Aceh: PKS, Mitra Kritis yang **Selalu** **Menjaga Silaturahmi**

## KUTIPAN

Banda Aceh (27/05) --- Gubernur Aceh Nova Iriansyah mengapresiasi sikap kritis Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terhadap berbagai kebijakan Pemerintah Aceh.

Gubernur menegaskan, sikap kritis PKS justru merupakan kontribusi positif sebagai introspektif bagi Pemerintah Aceh dalam menyelenggarakan pembangunan dan menggelindingkan roda pemerintahan.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Nova dalam sambutannya, saat menerima kunjungan silaturahmi Ketua Majelis Syura PKS Salim Segaf Al Jufri, di Restoran Meuligoe Gubernur Aceh, Jum'at (28/5/2022) pagi.

"Terima kasih atas kontribusi positif PKS yang sangat kritis dan konstruktif. Tetaplah seperti itu, karena memang begitulah PKS. Kritis namun tetap menjaga silaturahmi yang baik," ujar Gubernur.

"Mari sebagai anak bangsa dan sesuai tugas masing-masing, kita bangun bangsa ini, wabil khusus Aceh agar menjadi lebih baik," imbuh Gubernur.

Sementara itu, Ketua Majelis Syura PKS dalam tausiah singkatnya, mengutip salah satu kisah Rasulullah di suatu pagi bersama para sahabat beliau.

"Siapa yang pagi ini berpuasa sunnah? Siapa yang pagi ini sudah berinfak? Dan siapa pagi ini sudah menjenguk saudaranya yang sakit? Tak ada yangunjuk tangan selain Abubakar Assidiq. Saya ya Rasulullah, ujar Abubakar saat itu. Rasul menanyakan hal tersebut tanpa bertanya dalil. Setelah mendengar pengakuan Abubakar, kemudian Rasulullah bersabda, "Tidaklah semua itu ada pada seseorang kecuali dia pasti akan masuk surga." (HR. Muslim: 1707)"

Ketua Majelis Syura PKS ini menegaskan, tidak sulit membuat seseorang dicintai dan menjadi syurga. Tiga amalan di atas menunjukkan,

bahwa siapa saja orang yang hablum minallah dan hablum minannasnya (hubungan pada Allah dan hubungan dengan sesama manusia) bagus, maka seseorang tersebut akan dicintai siapa saja dan berhasil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Oleh karena itu, saya ingin Aceh ini menjadi contoh bagi semua daerah di Indonesia, sebagai contoh daerah yang baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Saya optimis, saudara-saudara saya di Aceh mampu mewujudkan itu," kata Ketua Majelis Syura PKS itu.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Aceh turut didampingi oleh Asisten Pemerintahan dan Keistimewaan Sekda Aceh M Jafar, Kepala Badan Kesbangkon Aceh Mahdi Effendi dan Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh Muhammad Iswanto serta Kepala Biro Umum Setda Aceh T Dharma.

Sementara itu, Ketua Majelis Syura PKS turut didampingi oleh sejumlah pengurus PKS Aceh dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dari fraksi PKS.



**NOVA IRIANSYAH**  
Gubernur Aceh

"Terima kasih atas kontribusi positif PKS yang sangat kritis dan konstruktif. Tetaplah seperti itu, karena memang begitulah PKS. Kritis namun tetap menjaga silaturahmi yang baik, Mari sebagai anak bangsa dan sesuai tugas masing-masing, kita bangun bangsa ini, wabil khusus Aceh agar menjadi lebih baik,"





# Dari Aceh, PKS Kobarkan Semangat Rebut Kemenangan Pemilu 2024

## KUTIPAN

Banda Aceh (27/05) --- Sebagai acara puncak dalam rangka kedatangan Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dr. H. Salim Segaf Al-Jufri di Aceh,

digelar konsolidasi dan silaturahmi pengurus serta kader PKS Se-Aceh di Amel Convention Hall, Jl. Prof. Ali Hasyimi, Lamte, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Jumat 27 Mei 2022.

Dalam kesempatan itu, Doktor Salim Segaf Al-Jufri bersama Ketua Fraksi PKS DPR RI, Dr. H. Jazuli Juwaini, MA menyampaikan orasi politik dihadapan Pengurus DPTW, DPTD dan seribuhan kader PKS se-Aceh yang hadir.

Diawal penyampaian, Doktor Salim mengajak seluruh kader dan simpatisan di seluruh Aceh untuk sama-sama memenangkan PKS. Katanya, PKS harus naik kelas dari partai menengah menjadi partai besar.

"Mari kita menangkan PKS di seluruh wilayah Indonesia, bumi Pertwi. Dan kita punya peluang untuk menjadi partai besar. Apakah

kita siap memenangkan PKS di 2024? Takbir,"kata Doktor Salim disambut lantunan Allah huakbar oleh seluruh hadirin yang hadir dengan gemuruh.

Menurut Doktor Salim, jika punya niat yang sama dan jga diringi ikhtiar maka akan mendapatkan hasil yang sempurna.

"Pasti kita sukses, untuk itu dalam kita berbangsa dan bernegara untuk mencapai kemenangan jadi lah pemain bukan jadi wasit," ujarnya.

Doktor Salim atau akrab disapa Habib Salim juga meminta kader PKS di Aceh janganlah sibuk melihat dan mencari-cari kesalahan orang sehingga kita lalai dan tidak punya waktu untuk memperbaiki diri sendiri.

Habib Salim pun mengumpamakan seseorang yang jadi wasit hanya melihat kesalahan orang, maka akan tidak pernah bisa mencetak gol,

namun jika menjadi pemain maka yang dicari adalah memasukkan gol, dan disitulah untuk meraih kemenangan.

"Mari kita bersama-sama rebut kemenangan, rebut semua pintu kemenangan dan Inshaallah kita akan berhasil untuk menang," ucap Doktor Salim dengan suara nada tinggi serta diikuti Takbir Allahhuakbar oleh hadirin yang hadir.

Habib Salim turut menyinggung soal calon Gubernur Aceh pada Pilkada 2024 mendatang dari kader PKS. Katanya, ada aroma - aroma dan semangat dari PKS Aceh untuk merebut jabatan Gubernur dan lapun mendukung langkah Anggota DPR RI dari Partai PKS Nasir Djamil untuk maju menjadi Calon Gubernur Aceh

"Kita harus optimis dan semangat kebersamaan dan kita lihat wajah-wajah gubernur Aceh kedepan. Saya lihat Pak Nasir Djamil untuk gubernur aceh kedepan. Inshaallah, inilah kekuatan kita semua. Kekuatan ulama, kekuatan seluruh masyarakat.

Selengkapnya kunjungi [fraksi.pks.id](http://fraksi.pks.id)



**Dr. SALIM**  
Ketua Majelis Syura PKS

"Kita harus optimis dan semangat kebersamaan dan kita lihat wajah-wajah gubernur Aceh kedepan. Saya lihat Pak Nasir Djamil untuk gubernur aceh kedepan. Inshaallah, inilah kekuatan kita semua. Kekuatan ulama, kekuatan seluruh masyarakat. Kita akan memastikan menang. Saya yakin, kita menang di Aceh dan menang diseluruh Indonesia,"

# Silaturahmi dengan Ulama, Dr. Salim: Syariat Islam di Aceh **Harus Jadi Teladan**

**KUTIPAN**

Banda Aceh (27/05) --- Ketua Majelis Syura PKS Dr Salim Segaf Al-Jufri berharap agar pelaksanaan syariat Islam di provinsi Aceh bisa menjadi teladan bagi daerah lain di Indonesia, bahkan di dunia.

Harapan tersebut disampaikan Ketua Majelis Syura PKS Dr. Salim Segaf Al-Jufri saat silaturahmi dengan Ulama Aceh di Hotel Kryad Banda Aceh, Kamis (26/05/2022) malam.

Menteri Sosial periode 2009-2014 itu menyebutkan jika Aceh gagal melaksanakan syariat Islam maka hal itu akan berdampak buruk tidak hanya bagi Aceh akan tetapi juga bagi daerah lain, oleh karenanya la berharap agar Aceh selalu memberikan contoh terbaik.

"Aceh harus menjadi contoh terbaik, karena kalau Aceh gagal, bagaimana dengan daerah lain," ujarnya.

Salim berharap kader-kader PKS baik di parlemen maupun di luar parlemen berperan dan berkontribusi terhadap kesuksesan pelaksanaan syariat Islam di

Aceh.

Pada kesempatan itu, Dr. Salim juga menyampaikan banyaknya tantangan yang dihadapi, dan PKS punya tanggung jawab besar untuk menjawab tantangan tersebut.

Oleh karena itu Salim berpesan kepada struktur dan kader PKS untuk rajin bersilaturahmi dengan masyarakat. Ia juga mengingatkan bahwa PKS bukan hanya milik kader PKS akan tetapi milik umat dan bangsa Indonesia.

Sementara itu perwakilan ulama yang hadir dalam kegiatan tersebut Abi Daud Hasbi, meminta agar PKS terus mengorbit kader-kader yang memiliki jiwa amanah, jujur, mampu, berakhlakul karimah, ilmu bagus dan bermasyarakat, sehingga PKS semakin sukses

kedepannya.

"Kalau semua itu ada, maka masyarakat akan semakin yakin dengan PKS. Dan Kedepan kalau mampu dicari kader seperti itu maka PKS akan sukses di Aceh bahkan nasional, dan harus banyak anggota DPR RI dari PKS," lanjutnya.

Sementara itu ketua MPU Banda Aceh Damanhuri Basyir mengakui banyak hal positif yang sudah dilakukan PKS. Menurutnya PKS senyawa dengan Aceh.

Pada kesempatan itu Damanhuri meminta PKS untuk memperjuangkan penambahan kuota Haji untuk Aceh mengingat daftar tunggu haji Aceh saat ini sangat lama.

Silaturahmi Ketua Majelis Syura PKS Dr Salim Segaf Al-Jufri dengan Ulama turut dihadiri oleh ketua fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini, anggota DPR RI asal Aceh HM Nasir Djamil, Ketua DPP PKS Wilayah Sumbagut, ketua DPW PKS Mahyarrudin Yusuf dan pengurus DPW PKS Aceh.



**Dr. SALIM**  
Ketua Majelis Syuro PKS

"Jika Aceh gagal melaksanakan syariat Islam maka hal itu akan berdampak buruk tidak hanya bagi Aceh akan tetapi juga bagi daerah lain, oleh karenanya la berharap agar Aceh selalu memberikan contoh terbaik. Aceh harus menjadi contoh terbaik, karena kalau Aceh gagal, bagaimana dengan daerah lain

Bertemu Wali Nanggroe

# Ketua Majelis Syura PKS Siap Perjuangkan Perpanjangan Dana Otsus Aceh

**KUTIPAN**

Banda Aceh (26/05) --- Ketua Majelis Syura PKS Dr. Salim Segaf Al-Jufri mengatakan, PKS siap memperjuangkan Agar dana otonomi khusus (Otsus) untuk Aceh tidak berakhir pada tahun 2027.

PKS, sebut Dr. Salim, melalui perwakilannya di parlemen akan mendesak pemerintah pusat agar dana Otsus untuk Aceh terus diberikan tanpa batas waktu, termasuk tidak mengurangnya.

Hal demikian disampaikan Dr. Salim disela-sela silaturahmi dengan Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al-Haytar, di Meuligoe Wali Nanggroe, Kamis (26/05/2022).

Dr. Salim mengatakan Jawa masyarakat Aceh untuk Indonesia tidak bisa dinilai dengan uang, apalagi sejarah sudah membuktikan bahwa masyarakat Aceh luar biasa kontribusinya untuk NKRI, sejak zaman kemerdekaan.

“Kita berharap selamanya

berlaku (dana Otsus) untuk Aceh termasuk tidak mengurangnya menjadi satu persen, karena jika nanti masyarakat Aceh sudah sejahtera, mereka juga akan memberikan kontribusi lagi untuk negara yang kita cintai ini,” ujar Menteri sosial periode 2009-2014 tersebut.

Untuk diketahui, Ketua Majelis Syura PKS Dr Salim melakukan kunjungan ke Aceh, Kamis (26/05/2022).

Setibanya di Aceh, Dr Salim melakukan silaturahmi ke Meuligoe Wali Nanggroe.

Dr. Salim dan rombongan diterima Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al-Haytar, yang diawali dengan Peusjukk dan penyematan medali tanda jasa sebagai Menteri sosial RI 2009-

2014, atas jasa dan dedikasi Pasca bencana alam gempa bumi dan tsunami Aceh tahun 2004.

Pada kesempatan itu juga dilaksanakan pertukaran cendramata antara Wali Nanggroe Malik Mahmud Al-Haytar dengan Dr. Salim Segaf Al-Jufri. Salim juga menyerahkan buku kepada wali Nanggroe.

Turut mendampingi Ketua Majelis Syura PKS Dr Salim Segaf Al-Jufri antara lain, ketua fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini, Anggota DPR RI asal Aceh dari PKS M. Nasir Djamil dan Rafli.

Hadir juga ketua DPW PKS Aceh Tgk Makhyaruddin Yusuf beserta pengurus PKS Aceh, anggota DPRK Fraksi PKS serta anggota DPRK kabupaten/kota dari PKS dan rombongan.

Dr. Salim dijadwalkan juga diendahkan akan mengisi khutbah Jum'at di Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh dan bertemu dengan anggota PKS se Aceh pada Jumat (27/05/2022).



**Dr. SALIM**  
Ketua Majelis Syura PKS

“Kita berharap selamanya berlaku (dana Otsus) untuk Aceh termasuk tidak mengurangnya menjadi satu persen, karena jika nanti masyarakat Aceh sudah sejahtera, mereka juga akan memberikan kontribusi lagi untuk negara yang kita cintai ini,”



**Kunjungi  
Kanal Resmi  
Fraksi PKS DPR RI**

-  Website  
[fraksi.pks.id](http://fraksi.pks.id)
-  Instagram  
[fraksipksdpri](https://www.instagram.com/fraksipksdpri)
-  Twitter  
[@fraksipksdpri](https://twitter.com/fraksipksdpri)
-  Facebook  
[Fraksi PKS DPR RI](https://www.facebook.com/fraksi.pks.dpr.ri)
-  Youtube  
[PKSTV DPR RI](https://www.youtube.com/playlist?list=PLKSTV DPR RI)

***Nantikan  
Setiap Pekan***